



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 1144/500.6.12/XI/2024

TENTANG  
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
  2. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Nomor : 521.5/128.14/KP/VII/2024 tentang Penyusunan Tim Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
Pada tanggal 25 November 2024

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

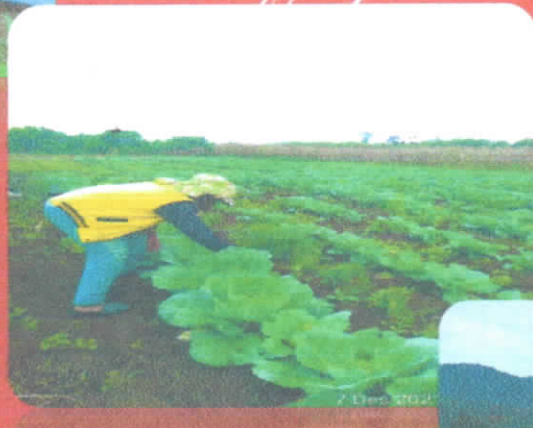
SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatra Utara di Medan;

**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
(FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS)  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2024**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR: 1144/500.6.12/XI/2024  
TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
(*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*)  
TAHUN 2024

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ketahanan pangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; dan (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; dan (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; dan (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di

Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2023 menunjukkan bahwa desa/kel rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 35 desa/kel dari 169 desa/kel (20,71%) yang terdiri dari 1 desa/kel (0,59%) Prioritas 1; 9 desa/kel (5,33%) Prioritas 2; 25 desa/kel (14,79%) Prioritas 3. Desa prioritas 1 berada di desa Alur Subur Kecamatan Tanah Pinem, Desa prioritas 2 tersebar di terdapat di wilayah Kecamatan Kecamatan Parbuluan (1 desa), Kecamatan Sumbul (1 desa), Kecamatan Siempat Nempu (1 desa), Kecamatan Siempat Nempu Hilir (2 desa), Kecamatan Pegagan Hilir (2 desa) dan Kecamatan Tanah Pinem (3 desa) , Prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Berampu (2 desa), Kecamatan Lae Parira (3 desa), Kecamatan Parbuluan (2 desa), Kecamatan Pegagan Hilir (2 desa) ), Kecamatan Siempat Nempu (2 desa), ), Kecamatan Siempat Nempu Hilir (2 desa), Kecamatan Siempat Nempu Hulu (1 desa), Kecamatan Silahisabungan (2 desa), Kecamatan Silima punga-punga (1 desa), Kecamatan Sumbul (5 desa), dan Kecamatan Tanah Pinem (3 desa)
7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan (a).Masih banyak penduduk yang belum menggunakan fasilitas air bersih untuk keperluan rumah tangga, (b) Masih banyaknya penduduk yang mempunyai penghasilan rendah/kurang mampu sehingga susah untuk dapat mengakses pangan dengan baik, (c) Tenaga Kesehatan yang masih belum mencukupi untuk setiap desa.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
  - a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
  - b. Peningkatan Ketersediaan pangan dengan membuka lahan pertanian baru, meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan lahan pertanian non sawah, menyediakan sarana dan prasarana.
  - c. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
  - d. Penyediaan tenaga kesehatan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang.**

Kabupaten Dairi terdiri dari 15 kecamatan dan 169 desa/kelurahan dengan total penduduk sebesar 324.747 jiwa (BPS). Secara astronomis terletak di antara 2° 15'00"- 3°00'00 Lintang utara dan 98° 00'- 98°30' Bujur Timur tepatnya di sebelah Barat daya Provinsi Sumatera Utara, dengan ketinggian wilayah antara 400 – 1.700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Dairi di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Tanah Karo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Samosir dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki wilayah daratan seluas 1.927,8 km<sup>2</sup> atau 192780 ha. Secara klimatologis, Kabupaten Dairi memiliki pola tipe curah hujan tipe ekuatorial, yaitu daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun dan daerah kering memiliki curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun.

Perekonomian Kabupaten Dairi tergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Akan tetapi sektor ini tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 202

2 peranannya naik dari 43,47% menjadi 44,30%. Kenaikan ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami kenaikan peranan. Selain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor yang mengalami kenaikan tahun adalah sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu dari 17,67% menjadi 17,76%; dan sektor Transportasi dan Pergudangan dari 4,12% menjadi 4,49%. Sementara sektor lainnya mengalami penurunan. Sektor Konstruksi menunjukkan peranan sebesar 12,92%, sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 8,93%, sektor Real Estat sebesar 2,74%, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,08%, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 1,02%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2019.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

## 1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

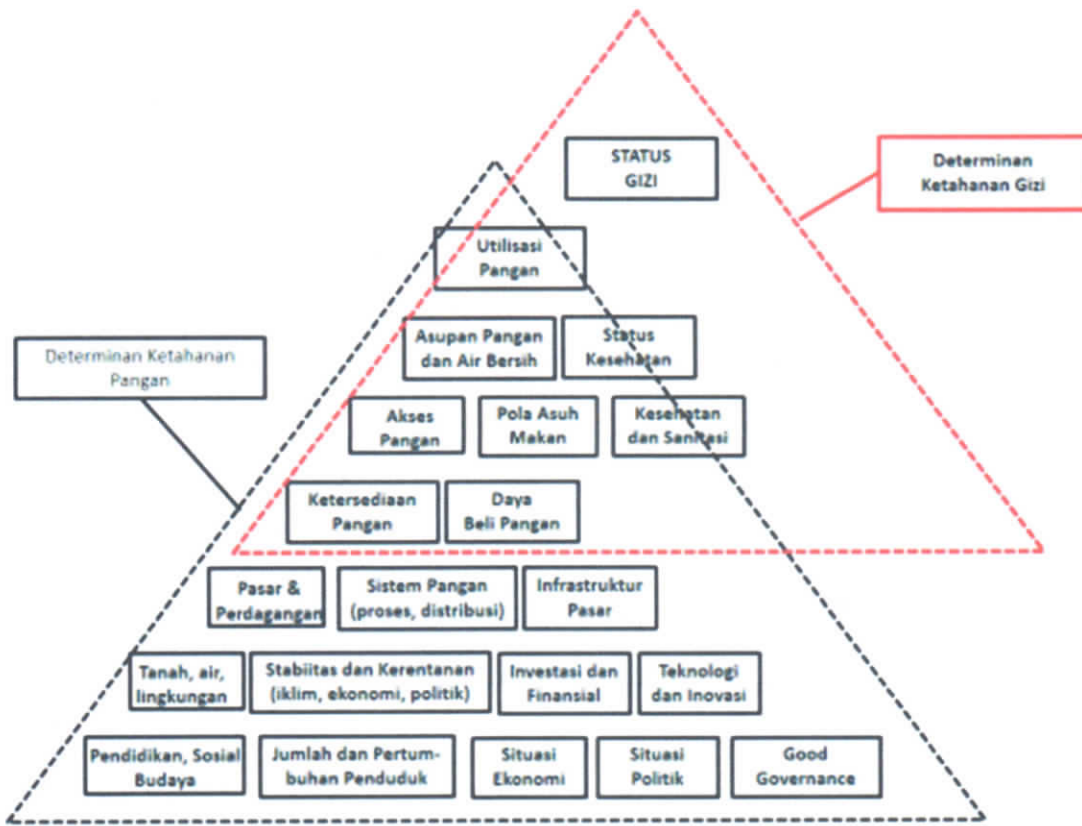
Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumahtangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO<sup>1</sup> mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013<sup>2</sup> juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus

<sup>1</sup> Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

<sup>2</sup> Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi  
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

**Ketersediaan pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

**Akses pangan** adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara

fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

**Pemanfaatan pangan** merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

**Dampak gizi dan kesehatan** merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

**Kerawanan pangan transien** adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

### 1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

#### Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

**Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2023**

<b>Indikator</b>	<b>Definisi</b>	<b>Sumber Data</b>
<b>A. Aspek Ketersediaan Pangan</b>		
Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa	Luas lahan pertanian dibandingkan luas wilayah desa	Pusdatin-Kementan 2019 diolah BKP
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga di desa	1. Bagian Perekonomi, 2023 2. Dinas Perdagangan, 2023
<b>B. Aspek Akses terhadap Pangan</b>		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	1. Dinas Sosial (DTKS), 2023 2. BAPEDDA (P3KE), 2023

<b>Indikator</b>	<b>Definisi</b>	<b>Sumber Data</b>
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	1. Dinas PUTR, 2023
<b>C. Aspek Pemanfaatan Pangan</b>		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	1. Dinas PUTR, 2023 2. Dinas Kesehatan, 2023
Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap penduduk	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	1. Dinas Kesehatan, 2023

## **Metode Analisis**

### **1. Analisis Indikator Individu**

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

### **2. Analisis Komposit**

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara

tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- $Y_j$  : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
- $a_i$  : Bobot masing-masing indikator
- $X_{ij}$  : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

**Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu**

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
8	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

$K_j$  : *cut off point* komposit ke-J

$a_i$  : Bobot indikator ke-i

$C_{ij}$  : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

### 3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

## **BAB II**

### **KETERSEDIAAN PANGAN**

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

#### **2.1. LAHAN PERTANIAN**

Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan pertanian dengan luas wilayah desa. Rasio lahan pertanian terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan<sup>3</sup>. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi, 26 desa masuk dalam prioritas 1 (15,38%) ,25 desa prioritas 2 (14,79 %) dan 35 desa prioritas 3 (20,71 %). Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1 sebagian besar tersebar di Kecamatan Sidikalang yaitu sebanyak 10 desa.

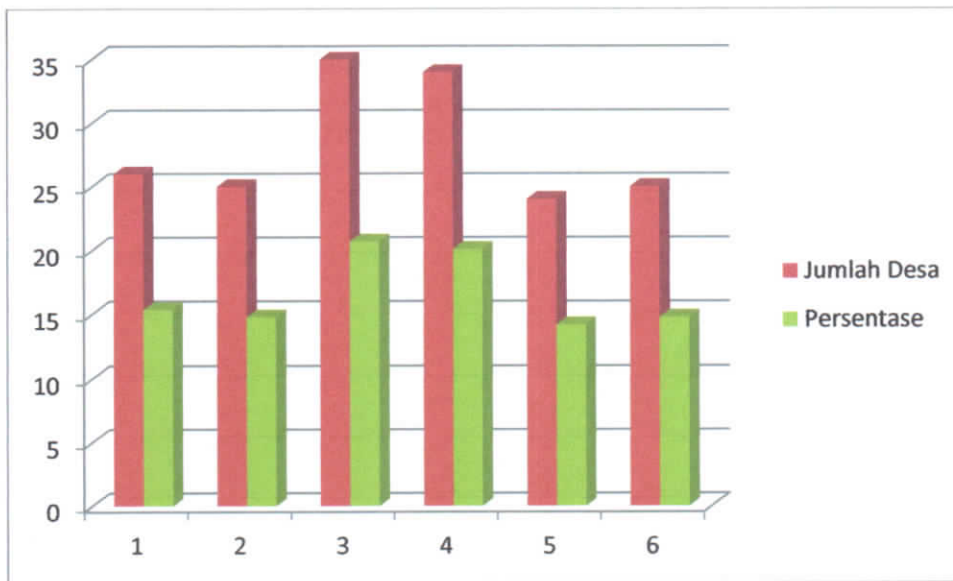
---

<sup>3</sup> Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan

**Tabel 2.1** Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio lahan Pertanian	Jumlah Desa	Persentase
1	$\leq 0,0267$	26	15,38
2	$> 0,0267 - 0,0617$	25	14,79
3	$> 0,0617 - 0,0921$	35	20,71
4	$> 0,0921 - 0,1557$	34	20,11
5	$> 0,1557 - 0,2409$	24	14,20
6	$> 0,2409$	25	14,79

**Gambar 2.1** Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas



**Tabel. 2.1.** Skala Prioritas Indikator Luas Lahan Pertanian dibandingkan Luas Wilayah

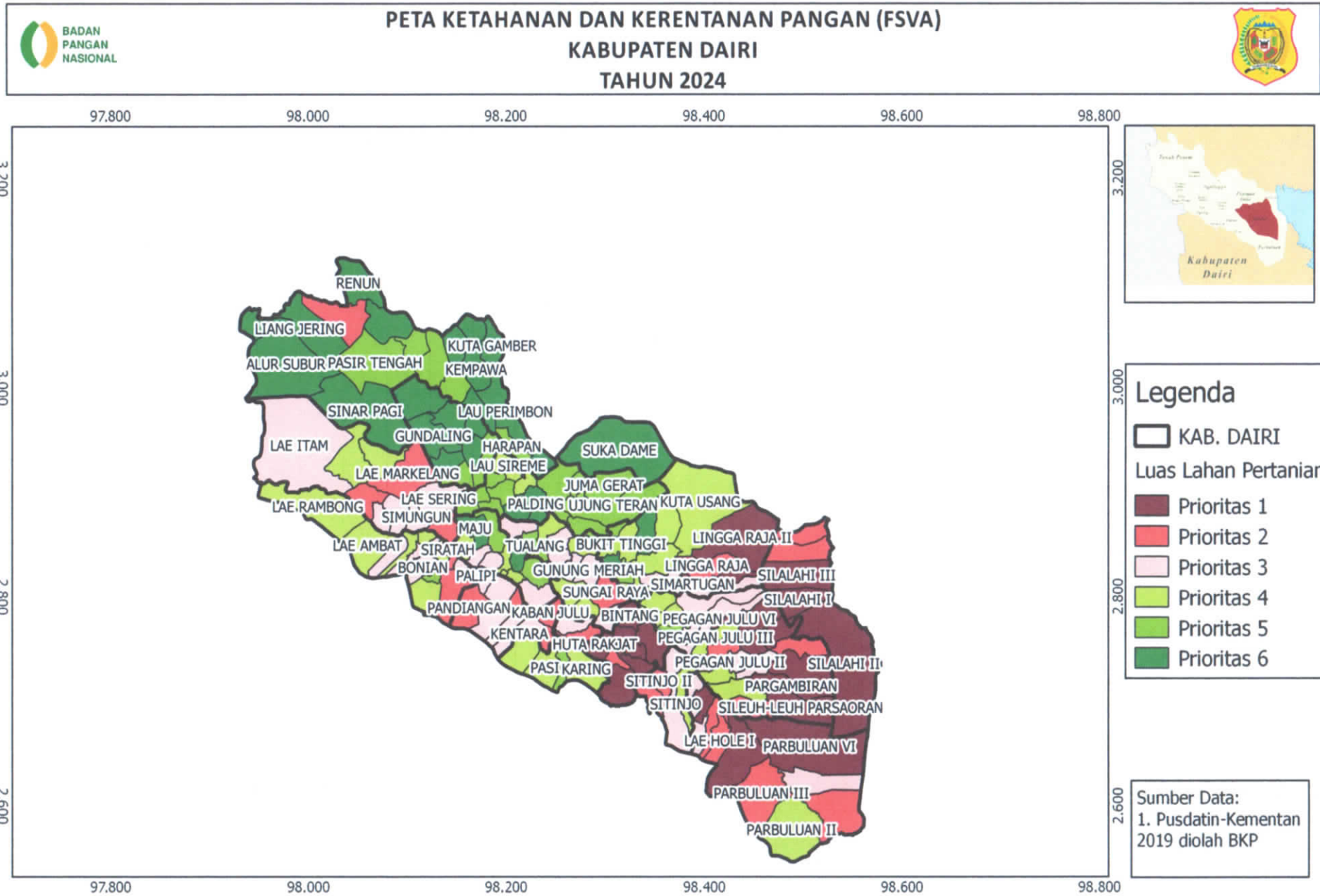
No.	Nama Kec	Nama Desa	P.Lahan
1	SIDIKALANG	SIDIANGKAT	1
2	SIDIKALANG	BATANG BERUH	1
3	SIDIKALANG	BINTANG HULU	1
4	SIDIKALANG	KALANG SIMBARA	1
5	SIDIKALANG	BINTANG	1
6	SIDIKALANG	KALANG	1
7	SIDIKALANG	KOTA SIDIKALANG	1
8	SIDIKALANG	KUTA GAMBIR	1
9	SIDIKALANG	HUTA RAKJAT	1
10	SIDIKALANG	BINTANG MERSADA	1
11	BERAMPU	BERAMPU	1
12	PARBULUAN	PARBULUAN IV	1
13	PARBULUAN	PARBULUAN VI	1
14	PARBULUAN	B A N G U N	1

15	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN	1
16	SUMBUL	DOLOK TOLONG	1
17	SUMBUL	PARGAMBIRAN	1
18	SUMBUL	PERJUANGAN	1
19	SUMBUL	SILEUH-LEUH PARSAORAN	1
20	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN I	1
21	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	1
22	SILAHISABUNGAN	SILALAH II	1
23	SILAHISABUNGAN	SILALAH III	1
24	TIGA LINGGA	TIGALINGGA	1
25	PEGAGAN HILIR	BANDAR HUTA USANG	1
26	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA II	1
27	SIDIKALANG	BELANG MALUM	2
28	SITINJO	PANJI DABUTAR	2
29	SITINJO	SITINJO II	2
30	PARBULUAN	PARBULUAN I	2
31	PARBULUAN	PARBULUAN III	2
32	PARBULUAN	LAE HOLE	2
33	PARBULUAN	LAE HOLE I	2
34	SUMBUL	PEGAGAN JULU I	2
35	SUMBUL	PANGGURUAN	2
36	SUMBUL	BARISAN NAULI	2
37	SILAHISABUNGAN	PAROPO	2
38	SILAHISABUNGAN	PAROPO I	2
39	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LONGKOTAN	2
40	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	PARONGIL	2
41	LAE PARIRA	SUMBUL	2
42	LAE PARIRA	BULU DURI	2
43	LAE PARIRA	PANDIANGAN	2
44	LAE PARIRA	KABAN JULU	2
45	SIEMPAT NEMPU	HUTA IMBARU	2
46	SIEMPAT NEMPU HULU	SUNGAI RAYA	2
47	SIEMPAT NEMPU HILIR	PARDOMUAN	2
48	SIEMPAT NEMPU HILIR	J A N J I	2
49	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE MARKELANG	2
50	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA	2
51	TANAH PINEM	LAU NJUHAR	2
52	SITINJO	SITINJO	3
53	PARBULUAN	PARBULUAN V	3
54	PARBULUAN	LAE HOLE II	3
55	PARBULUAN	BANGUN I	3
56	SUMBUL	PEGAGAN JULU IV	3
57	SUMBUL	PEGAGAN JULU II	3
58	SUMBUL	PEGAGAN JULU VI	3
59	SUMBUL	PEGAGAN JULU VII	3
60	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SUMBARI	3
61	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	URUK BELIN	3

62	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BONIAN	3
63	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	POLLING ANAK-ANAK	3
64	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	PALIPI	3
65	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE PANGAROAN	3
66	LAE PARIRA	KENTARA	3
67	LAE PARIRA	LAE PARIRA	3
68	LAE PARIRA	SEMPUNG POLLING	3
69	LAE PARIRA	LUMBAN SIHITE	3
70	LAE PARIRA	LUMBAN TORUAN	3
71	SIEMPAT NEMPU	SIHORBO	3
72	SIEMPAT NEMPU	ADIAN NANGKA	3
73	SIEMPAT NEMPU	JUMATEGUH	3
74	SIEMPAT NEMPU	SOSORLONTUNG	3
75	SIEMPAT NEMPU HULU	LAE NUAHA	3
76	SIEMPAT NEMPU HULU	GUNUNG MERIAH	3
77	SIEMPAT NEMPU HULU	SILUMBOYAH	3
78	SIEMPAT NEMPU HULU	PANGARIBUAN	3
79	SIEMPAT NEMPU HULU	BAKAL JULU	3
80	SIEMPAT NEMPU HULU	P A N D A N	3
81	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE ITAM	3
82	SIEMPAT NEMPU HILIR	JAMBUR INDONESIA	3
83	SIEMPAT NEMPU HILIR	SIMUMGUN	3
84	SIEMPAT NEMPU HILIR	SOPO BUTAR	3
85	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE SERING	3
86	PEGAGAN HILIR	SIMARTUGAN	3
87	BERAMPU	KARING	4
88	BERAMPU	PASI	4
89	BERAMPU	SAMBALIANG	4
90	SITINJO	SITINJO I	4
91	PARBULUAN	PARBULUAN II	4
92	SUMBUL	PEGAGAN JULU V	4
93	SUMBUL	PEGAGAN JULU III	4
94	SUMBUL	PEGAGAN JULU IX	4
95	SUMBUL	PEGAGAN JULU X	4
96	SUMBUL	KUTA GUGUNG	4
97	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE RAMBONG	4
98	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE AMBAT	4
99	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE PANGINUMAN	4
100	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BAKAL GAJAH	4
101	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SIBORAS	4
102	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BONGKARAS	4
103	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SIRATAH	4
104	SIEMPAT NEMPU	SINAMPANG	4
105	SIEMPAT NEMPU	BUNTU RAJA	4
106	SIEMPAT NEMPU	JUMASIULOK	4
107	SIEMPAT NEMPU	ADIAN GUPA	4
108	SIEMPAT NEMPU HULU	TAMBAHAN	4
109	SIEMPAT NEMPU HULU	KUTA TENGAH	4
110	SIEMPAT NEMPU HULU	SIGAMBIR GAMBIR	4

111	SIEMPAT NEMPU HULU	SIPOLTONG	4
112	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE LUHUNG	4
113	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE HAPORAS	4
114	TIGA LINGGA	LAU BAGOT	4
115	TIGA LINGGA	LAU SIREME	4
116	PEGAGAN HILIR	SIMANDUMA	4
117	PEGAGAN HILIR	ONAN LAMA	4
118	PEGAGAN HILIR	BUKIT TINGGI	4
119	PEGAGAN HILIR	LAKSA	4
120	PEGAGAN HILIR	KUTA USANG	4
121	BERAMPU	BANJAR TOBA	5
122	SUMBUL	PEGAGAN JULU VIII	5
123	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	TUNGTUNG BATU	5
124	SIEMPAT NEMPU	SOBAN	5
125	SIEMPAT NEMPU	JUMANTUANG	5
126	SIEMPAT NEMPU HULU	TUALANG	5
127	TIGA LINGGA	SUMBUL TENGAH	5
128	TIGA LINGGA	UJUNG TERAN	5
129	TIGA LINGGA	JUMA GREAT	5
130	TIGA LINGGA	SARINTONU	5
131	TIGA LINGGA	SUKANDEBI	5
132	TIGA LINGGA	LAU MOLGAP	5
133	TIGA LINGGA	LAU PAKPAK	5
134	TIGA LINGGA	LAU MIL	5
135	TIGA LINGGA	PALDING JAYA	5
136	GUNUNG SITEMBER	BUKIT LAU KERSIK	5
137	GUNUNG SITEMBER	BATU GUNGUN	5
138	PEGAGAN HILIR	PERIK MBUE	5
139	PEGAGAN HILIR	BUKIT BARU	5
140	TANAH PINEM	PASIR TENGAH	5
141	TANAH PINEM	PAMAH	5
142	TANAH PINEM	TANAH PINEM	5
143	TANAH PINEM	HARAPAN	5
144	TANAH PINEM	PASIR MBELANG	5
145	SIEMPAT NEMPU	GOMIT	6
146	SIEMPAT NEMPU	MAJU	6
147	TIGA LINGGA	PALDING	6
148	TIGA LINGGA	BERTUNGEN JULU	6
149	GUNUNG SITEMBER	GUNUNG SITEMBER	6
150	GUNUNG SITEMBER	GUNDALING	6
151	GUNUNG SITEMBER	RANTE BESI	6
152	GUNUNG SITEMBER	KENDIT LIANG	6
153	GUNUNG SITEMBER	LAU LEBAH	6
154	GUNUNG SITEMBER	TUPAK RAJA	6
155	PEGAGAN HILIR	TANJUNG SALUKSUK	6
156	PEGAGAN HILIR	MBINANGA	6
157	TANAH PINEM	RENUN	6
158	TANAH PINEM	KUTA BULUH	6
159	TANAH PINEM	KEMPAWA	6

160	TANAH PINEM	KUTA GAMBER	6
161	TANAH PINEM	LAU PERIMBON	6
162	TANAH PINEM	GUNUNG TUA	6
163	TANAH PINEM	SUKA DAME	6
164	TANAH PINEM	LAU TAWAR	6
165	TANAH PINEM	MANGAN MOLIH	6
166	TANAH PINEM	LIANG JERING	6
167	TANAH PINEM	ALUR SUBUR	6
168	TANAH PINEM	BALANDUA	6
169	TANAH PINEM	SINAR PAGI	6



## 2.2. PRODUKSI

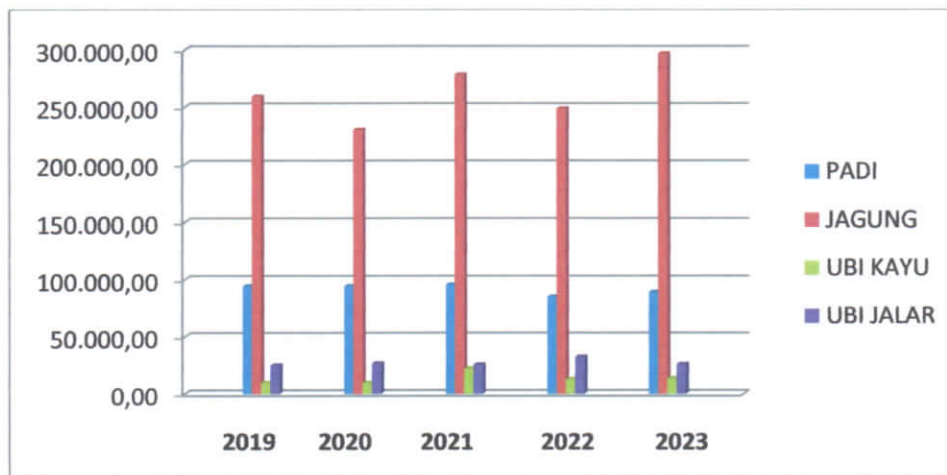
Pemerintah Kabupaten Dairi telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 44,30 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dairi pada tahun 2023 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.2.1.** Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2019-2023 (Ton)

Serealia	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata 5 tahun
Padi	94.518,34	67.719,18	95.807,17	85.127,68	89.328,3	86.500,13
Jagung	259.385,7	230.115,3	278.495,4	248.749,3	296.941,0	262.737,34
Ubi Kayu	9.554,35	9.510,73	22.228,82	12.725,13	13.555,21	13.514,85
Ubi Jalar	25.083,03	26.930,37	25.821,83	32.544,41	26.151,83	27.306,29

Sumber: Dairi Dalam Angka 2019-2023, BPS

**Gambar 2.2.1.**Produksi Serealia Pokok dan Umbi-Umbian Tahun 2019-2023 (Ton)



Tahun 2023, total produksi serealia dan umbi-umbian mencapai 425.976,34ton, padi 89.328,30 ton, jagung 296.941 ton, ubi kayu 13.555,21 ton dan ubi jalar 26.151,83 ton.

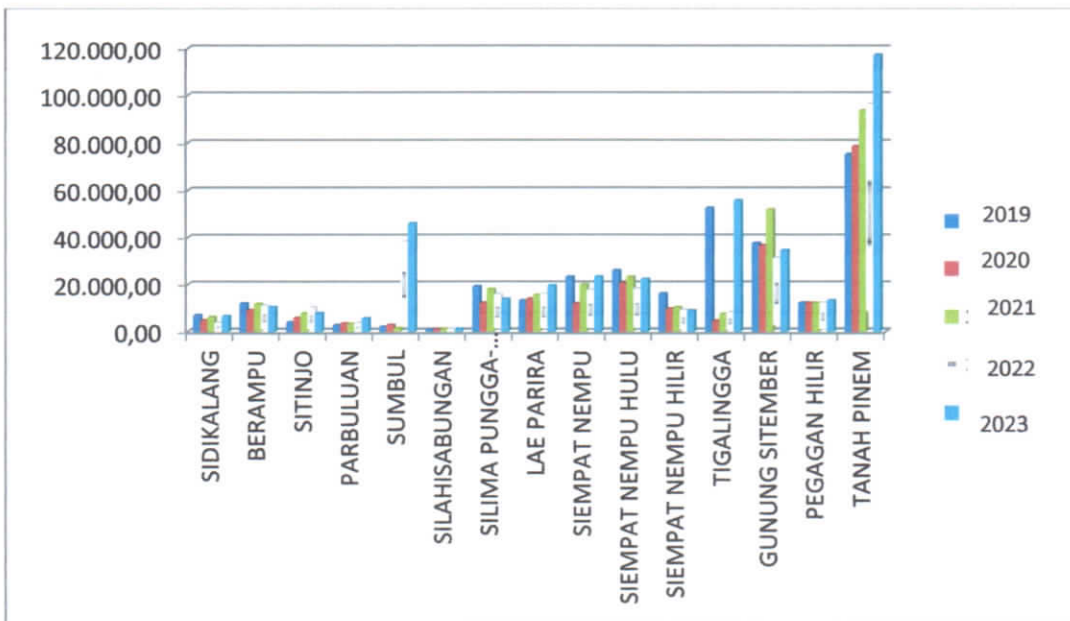
Total produksi serealia dan laju pertumbuhan produksi tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan dari total produksi tahun 2022 sebesar 293.876,98 ton menjadi 362.954,52 ton pada tahun 2023. Sebaran total produksi serealia selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 362.954,52 ton dan terkecil pada tahun 2020. Produksi serealia pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.2.2.

**Tabel 2.2.2.** Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2019-2023)

No	Kecamatan	Produksi Serealia				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sidikalang	6.907,99	4.681,84	6.130,15	3.800,92	6.561,02
2	Berampu	11.998,03	9.087,24	11.779,63	11.063,78	10.455,03
3	Sitinjo	3.925,81	5.787,63	7.724,47	10.424,86	7.813,25
4	Parbuluan	2.735,61	3.359,01	3.262,94	3.607,50	5.596,06
5	Sumbul	2.048,40	2.742,25	1.405,99	38.225,22	45.947,19
6	Silahisabungan	766,35	896,98	990,84	1.256,46	1.051,01
7	Silima Punggapungga	19.205,71	12.226,90	17.991,25	15.838,67	13.893,80
8	Lae Parira	13.288,07	13.895,01	15.524,41	16.053,26	19.533,81
9	Siempat Nempu	23.226,05	11.965,25	19.881,93	17.801,92	23.314,91
10	Siempat Nempu Hulu	26.011,56	20.680,30	23.178,05	18.245,80	22.332,95
11	Siempat Nempu Hilir	16.221,18	9.676,05	10.340,41	9.318,18	8.987,31
12	Tiga Lingga	52.520,54	4.455,55	7.411,81	8.281,53	55.696,11
13	Gunung Sitember	37.538,69	36.601,58	51.837,25	31.204,85	34.517,21
14	Pegagan Hilir	12.323,03	12.233,43	12.182,88	12.242,41	13.255,19
15	Tanah Pinem	75.187,04	78.545,42	93.640,55	96.511,62	117.314,58
	<b>Total</b>	<b>303.904,1</b>	<b>226.834,4</b>	<b>283.282,6</b>	<b>293.877</b>	<b>362.954,6</b>

Sumber: Dairi Dalam Angka 2019-2023, BPS

**Gambar 2.2.2** Produksi Serealia Tahun 2019-2023



## Padi

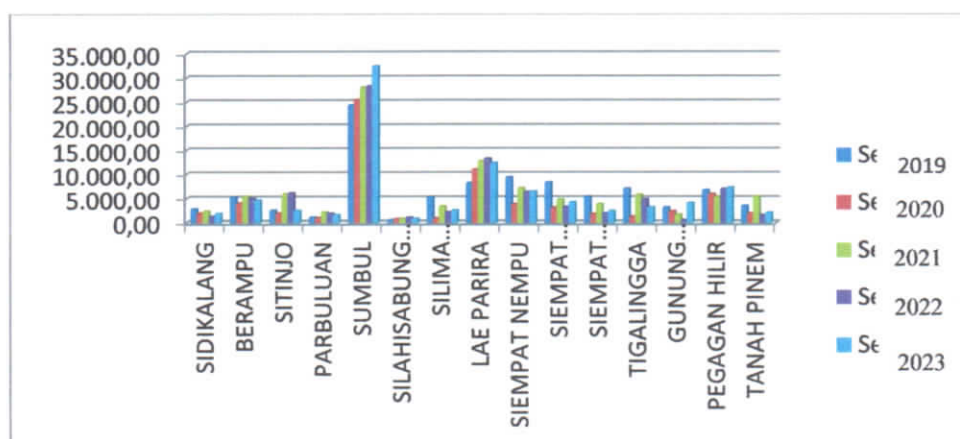
Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Dairi selama 5 tahun terakhir (2019-2023) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.2.3. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2023 di 9 Kecamatan. Peningkatan terjadi di kecamatan Sumbul. Produksi padi tertinggi di kecamatan Sumbul sebesar 32.559,86 ton pada tahun 2023.

**Tabel 2.2.3.** Produksi Padi Tahun 2019 - 2023 (Ton)

No	Kecamatan	Produksi Padi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sidikalang	2.891,37	1.975,71	2.438,50	1.275,30	1.960,17
2	Berampu	5.273,21	4.060,86	5.506,76	4.976,58	4.635,51
3	Sitinjo	2.618,66	1.977,91	6.000,83	6.213,76	2.561,10
4	Parbuluan	1.161,45	1.054,77	2.227,43	1.971,38	1.652,10
5	Sumbul	24.419,21	25.480,07	28.108,84	28.343,28	32.559,86
6	Silahisabungan	598,59	797,23	877,49	1.096,68	891,23
7	Silima Punggapunga	5.346,73	919,45	3.384,38	2.194,21	2.615,00
8	Lae Parira	8.260,65	11.040,39	12.775,30	13.354,44	12.388,72
9	Siempat Nempu	9.444,63	3.877,85	7.221,85	6.411,62	6.528,60
10	Siempat Nempu Hulu	8.421,74	3.124,00	4.815,74	3.275,60	4.270,45
11	Siempat Nempu Hilir	5.502,88	1.824,00	3.872,67	1.943,50	2.490,43
12	Tiga Lingga	7.116,47	1.288,78	5.867,81	4.858,68	3.192,53
13	Gunung Sitember	3.181,62	2.407,82	1.714,87	597,00	4.113,20
14	Pegagan Hilir	6.790,90	5.979,17	5.489,42	7.018,50	7.325,11
15	Tanah Pinem	3.490,24	1.910,79	5.505,28	1.597,15	2.144,14
	Total	164.369,3	67.719,18	95.807,17	85.127,68	89.328,38

Sumber: Dairi Dalam Angka 2019-2023, BPS

**Gambar 2.2.3.** Produksi Padi Tahun 2019-2023 (Ton)



## Jagung

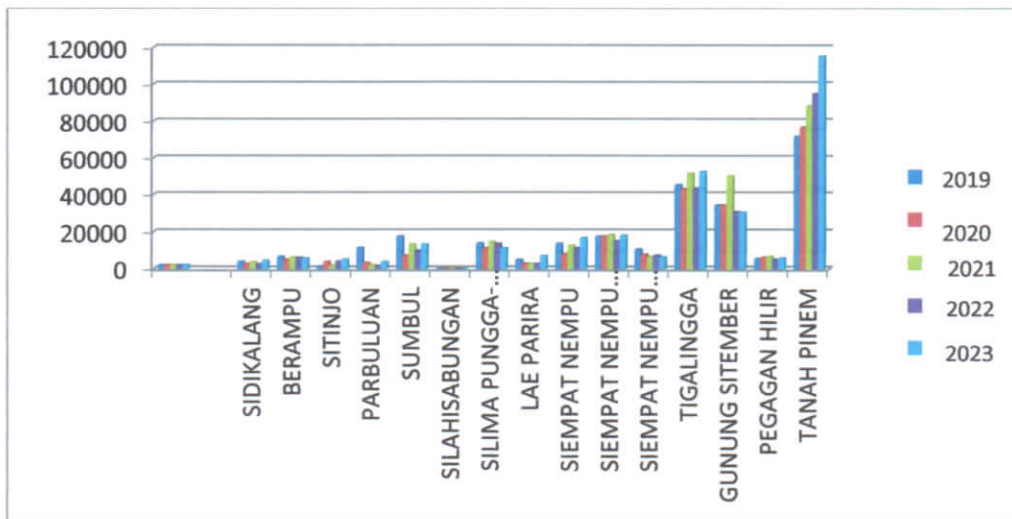
Pada tahun 2023, produksi jagung mencapai 296.941,02 ton. Kontruksi terbesar terjadi di Kecamatan Tanah Pinem sebesar 115.170,44 ton, menyusul Kecamatan Tigalingga 52.503,58 ton dan terendah Kecamatan Silahisabungan 159,78 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.2.4

**Tabel 2.2.4.** Produksi Jagung Tahun 2019 - 2023 (Ton)

No	Kecamatan	Produksi Jagung				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sidikalang	4.016,62	2.706,13	3.691,65	2.525,60	4.600,85
2	Berampu	6.724,82	5.026,38	6.292,87	6.087,20	5.819,52
3	Sitinjo	1.307,15	3.809,72	1.723,64	4.211,10	5.251,92
4	Parbuluan	11.574,16	3.304,24	2.035,51	1.636,10	3.943,96
5	Sumbul	17.629,19	7.262,18	13.297,15	9.881,90	13.387,33
6	Silahisabungan	167,76	99,75	113,35	159,80	159,78
7	Silima Punggapungga	13.858,98	11.307,45	14.606,87	13.644,50	11.278,80
8	Lae Parira	5.027,42	2.854,62	2.749,11	2.698,80	7.145,09
9	Siempat Nempu	13.781,42	8.087,40	12.660,08	11.390,30	16.786,31
10	Siempat Nempu Hulu	17.589,82	17.555,95	18.362,21	14.970,20	18.062,50
11	Siempat Nempu Hilir	10.781,30	7.852,05	6.467,74	7.374,70	6.496,88
12	Tiga Lingga	45.404,07	43.166,77	51.544,00	43.422,90	52.503,58
13	Gunung Sitember	34.357,07	34.193,76	50.122,38	30.607,90	30.404,01
14	Pegagan Hilir	5.532,13	6.254,26	6.693,46	5.223,90	5.930,08
15	Tanah Pinem	71.696,80	76.634,63	88.135,27	94.914,50	115.170,44
	Total	259.385,8	230.115,2	278.495,2	248.749,4	296.941,2

Sumber: Dairi Dalam Angka 2019-2023, BPS

**Gambar 2.2.4.** Produksi Jagung Tahun 2019 - 2023 (Ton)



## Ubi Kayu

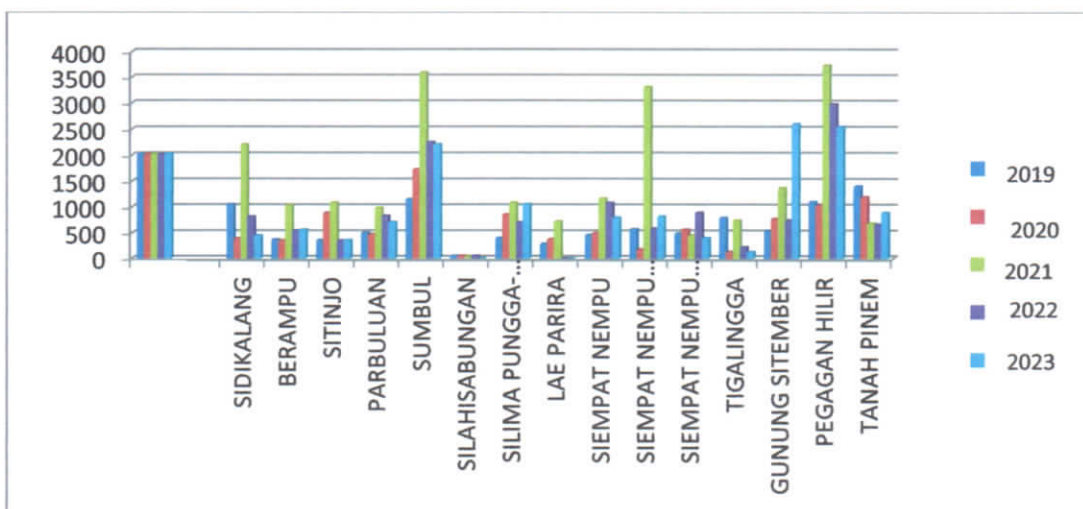
Produksi ubi kayu meningkat dari 9.554,36 ton pada tahun 2019 menjadi 13.555,21 ton pada tahun 2023. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2023 meliputi kecamatan Gunung Sitember dan Kecamatan Pegagan Hilir. Rincian produksi ubi kayu tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.2.5.

**Tabel 2.2.5.** Produksi Ubi Kayu Tahun 2019 - 2023 (Ton)

No	Kecamatan	Produksi Ubi Kayu				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sidikalang	1.051,54	391,10	2.206,38	815,77	451,98
2	Berampu	371,32	351,77	1.035,78	540,18	566,75
3	Sitinjo	358,82	887,60	1.085,89	352,13	358,82
4	Parbuluan	506,72	475,05	981,77	832,69	712,58
5	Sumbul	1.156,76	1.726,50	3.596,30	2.252,41	2.209,92
6	Silahisabungan	53,53	53,53	35,68	53,53	-
7	Silima Punggapungga	400,72	856,72	1.084,71	704,72	1.057,08
8	Lae Parira	290,64	376,45	726,60	0,00	-
9	Siempat Nempu	461,21	496,69	1.170,77	1.082,08	798,26
10	Siempat Nempu Hulu	575,47	180,86	3.311,42	583,69	822,10
11	Siempat Nempu Hilir	489,21	566,46	457,03	894,45	399,09
12	Tiga Lingga	795,73	132,62	744,58	224,15	132,62
13	Gunung Sitember	536,41	774,81	1.368,84	746,47	2.602,58
14	Pegagan Hilir	1.102,34	1.035,73	3.739,02	2.978,23	2.547,30
15	Tanah Pinem	1.403,94	1.194,84	684,05	664,63	896,13
	Total	9.554,36	9.500,73	22.228,82	12.725,13	13.555,21

Sumber: Dairi Dalam Angka 2019-2023, BPS

**Gambar 2.2.5.** Produksi Ubi Kayu Tahun 2019 - 2023 (Ton)



**Ubi Jalar**

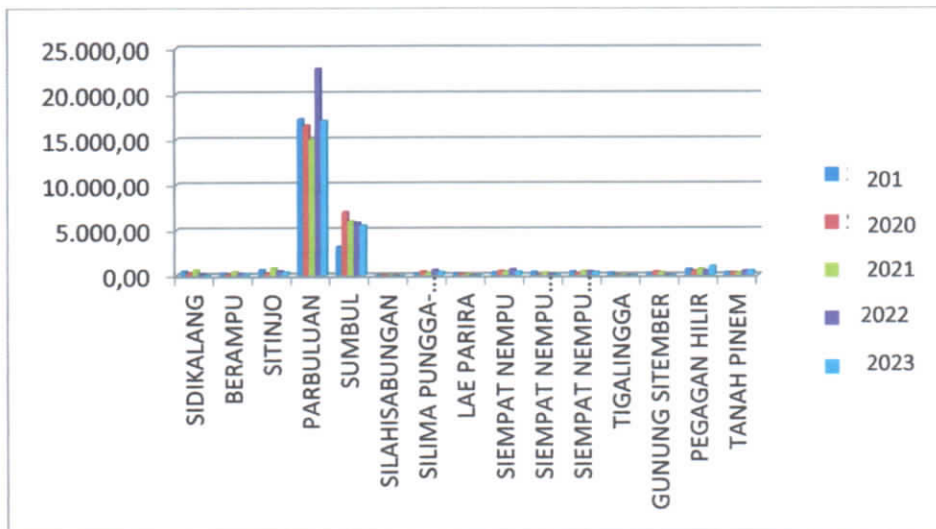
Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2019 - 2023) terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 26.151,83 ton. Kecamatan Parbuluan merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 17.115,70 ton, Kecamatan Sumbul sebesar 5.542,03 ton, dan Kecamatan Pegagan Hilir sebesar 1.026,89 ton. Rincian produksi ubi jalar tahun 2019 - 2023 disajikan pada Tabel 2.2.6.

**Tabel 2.2.6.** Produksi Ubi Jalar Tahun 2019 - 2023 (Ton)

No	Kecamatan	Produksi Ubi Jalar				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sidikalang	499,81	322,48	628,84	214,89	96,74
2	Berampu	275,21	137,61	432,48	252,95	216,58
3	Sitinjo	666,51	285,65	818,85	502,89	399,90
4	Parbuluan	17.278,38	16.585,40	15.031,09	22.805,31	17.115,70
5	Sumbul	3.206,95	6.982,08	5.978,41	5.854,28	5.542,03
6	Silahisabungan	32,89	65,78	0,00	0,00	0
7	Silima Punggapungga	212,37	434,39	308,90	621,18	386,12
8	Lae Parira	243,64	163,90	110,75	0,00	0
9	Siempat Nempu	337,86	485,67	422,32	673,10	411,76
10	Siempat Nempu Hulu	392,58	52,34	300,98	143,95	52,34
11	Siempat Nempu Hilir	424,30	233,37	466,73	443,35	381,87
12	Tiga Lingga	287,42	-	0,00	0,00	0
13	Gunung Sitember	207,20	391,37	322,31	23,02	0
14	Pegagan Hilir	684,60	479,22	700,16	520,58	1.026,89
15	Tanah Pinem	333,33	311,12	300,01	488,91	522,24
	Total	25.083,03	26.930,37	25.821,83	32.544,41	26.151,83

Sumber: Dairi Dalam Angka 2019-2023, BPS

**Gambar 2.2.6.** Produksi Ubi Jalar Tahun 2019 - 2023 (Ton)



### 2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

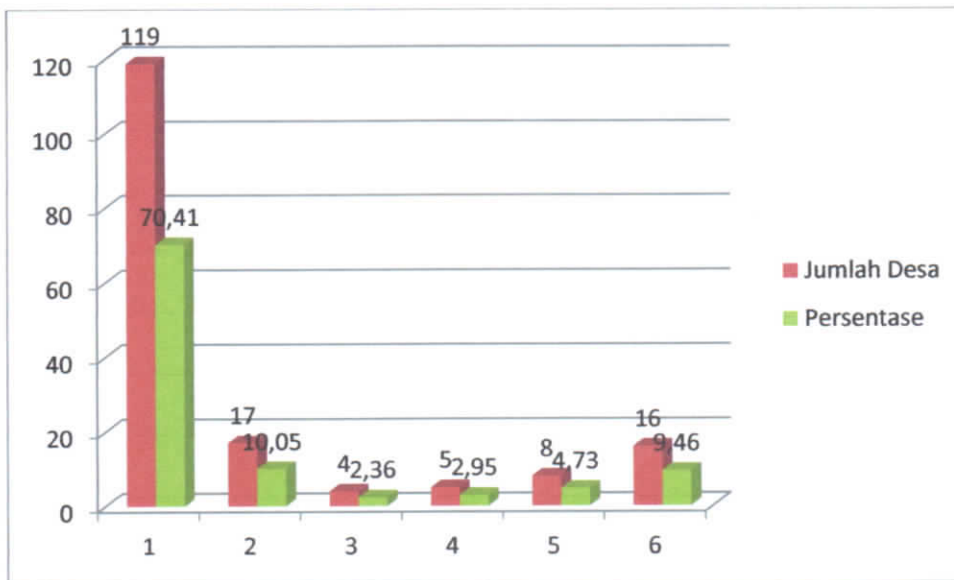
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 169 desa/kelurahan di Kabupaten Dairi, 119 desa masuk dalam prioritas 1 (70,41 %), 17 desa prioritas 2 (10,05 %) dan 4 desa prioritas 3 (2,36 %).

**Tabel 2.3.1.** Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,0347$	119	70,41
2	$> 0,0347 - 0,0453$	17	10,05
3	$> 0,0453 - 0,0534$	4	2,36
4	$> 0,0534 - 0,0646$	5	2,95
5	$> 0,0646 - 0,0854$	8	4,73
6	$> 0,0854$	16	9,46

**Gambar 2.3.1.** Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas



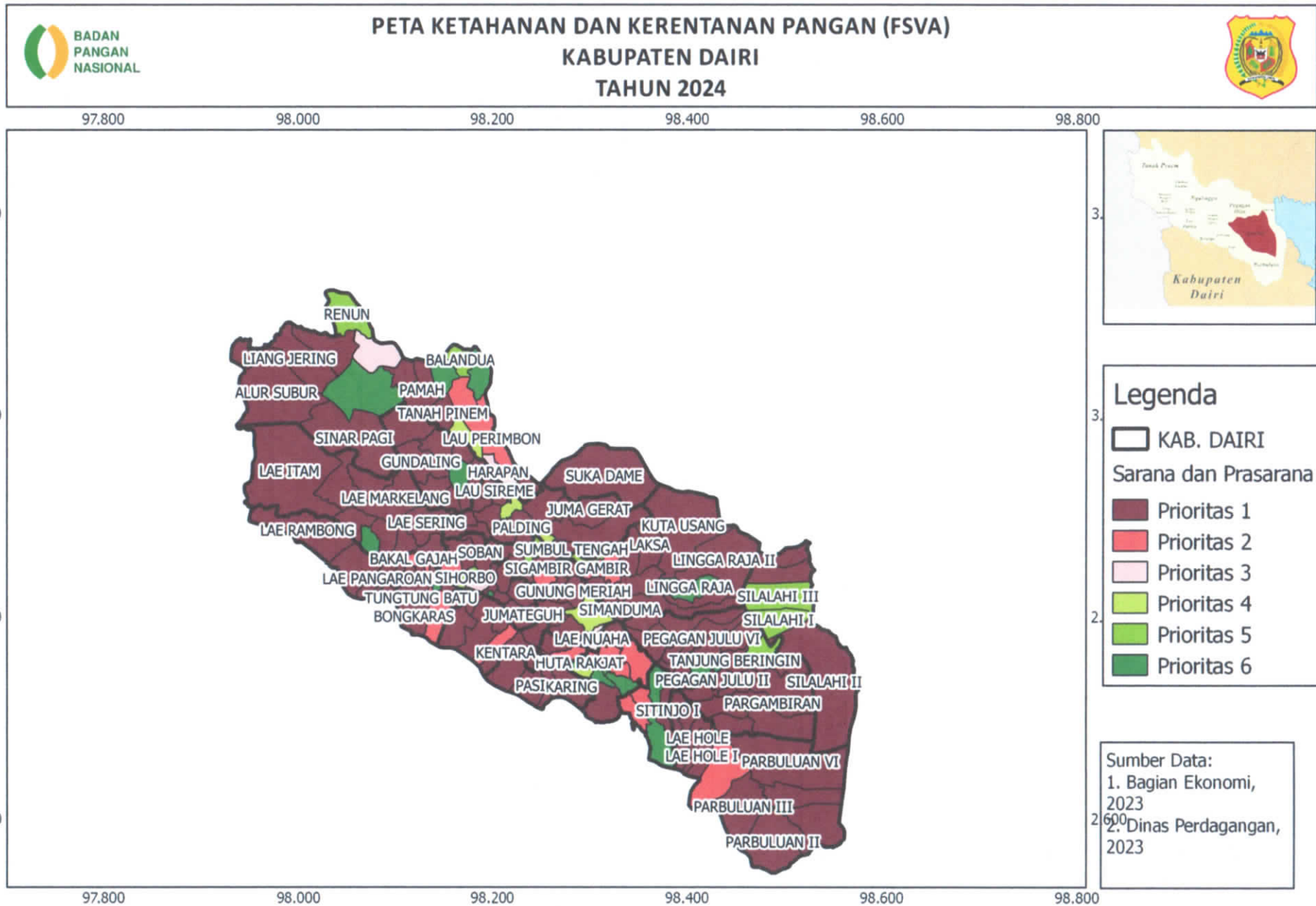
**2.3.2. Tabel** Skala Prioritas Indikator Sarana Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Rumah Jumlah Rumah Tangga

No.	Nama Kec	Nama Desa	P.Sarana
1	SIDIKALANG	SIDIANGKAT	1
2	SIDIKALANG	BINTANG	1
3	BERAMPU	KARING	1
4	BERAMPU	BANJAR TOBA	1
5	BERAMPU	PASI	1
6	BERAMPU	SAMBALIANG	1
7	SITINJO	SITINJO I	1
8	PARBULUAN	PARBULUAN II	1
9	PARBULUAN	PARBULUAN I	1
10	PARBULUAN	PARBULUAN V	1
11	PARBULUAN	PARBULUAN III	1
12	PARBULUAN	PARBULUAN VI	1
13	PARBULUAN	LAE HOLE	1
14	PARBULUAN	B A N G U N	1
15	PARBULUAN	LAE HOLE I	1
16	PARBULUAN	LAE HOLE II	1
17	PARBULUAN	BANGUN I	1
18	SUMBUL	PEGAGAN JULU V	1
19	SUMBUL	PEGAGAN JULU IV	1
20	SUMBUL	PEGAGAN JULU II	1
21	SUMBUL	PEGAGAN JULU III	1
22	SUMBUL	PEGAGAN JULU VI	1
23	SUMBUL	PEGAGAN JULU VII	1
24	SUMBUL	PEGAGAN JULU VIII	1
25	SUMBUL	PEGAGAN JULU IX	1
26	SUMBUL	PEGAGAN JULU X	1
27	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN	1
28	SUMBUL	DOLOK TOLONG	1
29	SUMBUL	KUTA GUGUNG	1
30	SUMBUL	PARGAMBIRAN	1
31	SUMBUL	PERJUANGAN	1
32	SUMBUL	SILEUH-LEUH PARSAORAN	1
33	SUMBUL	PANGGURUAN	1
34	SUMBUL	BARISAN NAULI	1
35	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	1
36	SILAHISABUNGAN	PAROPO	1
37	SILAHISABUNGAN	PAROPO I	1
38	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE RAMBONG	1
39	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE AMBAT	1
40	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE PANGINUMAN	1
41	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SUMBARI	1
42	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	URUK BELIN	1

43	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BONIAN	1
44	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BONGKARAS	1
45	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	TUNGTUNG BATU	1
46	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SIRATAH	1
47	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	POLLING ANAK-ANAK	1
48	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	PALIPI	1
49	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE PANGAROAN	1
50	LAE PARIRA	SUMBUL	1
51	LAE PARIRA	KENTARA	1
52	LAE PARIRA	BULU DURI	1
53	LAE PARIRA	SEMPUNG POLLING	1
54	LAE PARIRA	PANDIANGAN	1
55	LAE PARIRA	LUMBAN SIHITE	1
56	LAE PARIRA	LUMBAN TORUAN	1
57	LAE PARIRA	KABAN JULU	1
58	SIEMPAT NEMPU	SOBAN	1
59	SIEMPAT NEMPU	GOMIT	1
60	SIEMPAT NEMPU	JUMANTUANG	1
61	SIEMPAT NEMPU	JUMASIULOK	1
62	SIEMPAT NEMPU	JUMATEGUH	1
63	SIEMPAT NEMPU	SOSORLONTUNG	1
64	SIEMPAT NEMPU	MAJU	1
65	SIEMPAT NEMPU	ADIAN GUPA	1
66	SIEMPAT NEMPU HULU	TAMBAHAN	1
67	SIEMPAT NEMPU HULU	KUTA TENGAH	1
68	SIEMPAT NEMPU HULU	GUNUNG MERIAH	1
69	SIEMPAT NEMPU HULU	SIGAMBIR GAMBIR	1
70	SIEMPAT NEMPU HULU	SILUMBOYAH	1
71	SIEMPAT NEMPU HULU	TUALANG	1
72	SIEMPAT NEMPU HULU	BAKAL JULU	1
73	SIEMPAT NEMPU HULU	P A N D A N	1
74	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE ITAM	1
75	SIEMPAT NEMPU HILIR	PARDOMUAN	1
76	SIEMPAT NEMPU HILIR	JAMBUR INDONESIA	1
77	SIEMPAT NEMPU HILIR	SIMUNGUN	1
78	SIEMPAT NEMPU HILIR	J A N J I	1
79	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE MARKELANG	1
80	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE LUHUNG	1
81	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE SERING	1
82	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE HAPORAS	1
83	TIGA LINGGA	SUMBUL TENGAH	1
84	TIGA LINGGA	UJUNG TERAN	1
85	TIGA LINGGA	JUMA GREAT	1
86	TIGA LINGGA	SARINTONU	1
87	TIGA LINGGA	PALDING	1
88	TIGA LINGGA	BERTUNGEN JULU	1
89	TIGA LINGGA	SUKANDEBI	1
90	TIGA LINGGA	LAU MOLGAP	1
91	TIGA LINGGA	LAU PAKPAK	1

92	TIGA LINGGA	LAU MIL	1
93	TIGA LINGGA	LAU SIREME	1
94	GUNUNG SITEMBER	BUKIT LAU KERSIK	1
95	GUNUNG SITEMBER	BATU GUNGUN	1
96	GUNUNG SITEMBER	GUNDALING	1
97	GUNUNG SITEMBER	RANTE BESI	1
98	GUNUNG SITEMBER	KENDIT LIANG	1
99	GUNUNG SITEMBER	LAU LEBAH	1
100	GUNUNG SITEMBER	TUPAK RAJA	1
101	PEGAGAN HILIR	TANJUNG SALUKSUK	1
102	PEGAGAN HILIR	SIMANDUMA	1
103	PEGAGAN HILIR	BANDAR HUTA USANG	1
104	PEGAGAN HILIR	ONAN LAMA	1
105	PEGAGAN HILIR	LAKSA	1
106	PEGAGAN HILIR	SIMARTUGAN	1
107	PEGAGAN HILIR	PERIK MBUE	1
108	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA II	1
109	PEGAGAN HILIR	MBINANGA	1
110	PEGAGAN HILIR	KUTA USANG	1
111	TANAH PINEM	PAMAH	1
112	TANAH PINEM	TANAH PINEM	1
113	TANAH PINEM	GUNUNG TUA	1
114	TANAH PINEM	SUKA DAME	1
115	TANAH PINEM	LAU NJUHAR	1
116	TANAH PINEM	LIANG JERING	1
117	TANAH PINEM	ALUR SUBUR	1
118	TANAH PINEM	PASIR MBELANG	1
119	TANAH PINEM	SINAR PAGI	1
120	SIDIKALANG	BINTANG HULU	2
121	SIDIKALANG	KALANG SIMBARA	2
122	SIDIKALANG	KALANG	2
123	SIDIKALANG	BINTANG MERSADA	2
124	SITINJO	PANJI DABUTAR	2
125	SITINJO	SITINJO II	2
126	PARBULUAN	PARBULUAN IV	2
127	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BAKAL GAJAH	2
128	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SIBORAS	2
129	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LONGKOTAN	2
130	LAE PARIRA	LAE PARIRA	2
131	SIEMPAT NEMPU	SINAMPANG	2
132	SIEMPAT NEMPU	HUTA IMBARU	2
133	SIEMPAT NEMPU HULU	PANGARIBUAN	2
134	PEGAGAN HILIR	BUKIT TINGGI	2
135	TANAH PINEM	KEMPAWA	2
136	TANAH PINEM	LAU PERIMBON	2
137	SIEMPAT NEMPU	ADIAN NANGKA	3
138	SIEMPAT NEMPU HULU	LAE NUAHA	3
139	TANAH PINEM	HARAPAN	3
140	TANAH PINEM	MANGAN MOLIH	3

141	SIDIKALANG	KUTA GAMBIR	4
142	SIEMPAT NEMPU HULU	SUNGAI RAYA	4
143	TIGA LINGGA	LAU BAGOT	4
144	TIGA LINGGA	PALDING JAYA	4
145	TANAH PINEM	LAU TAWAR	4
146	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN I	5
147	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	5
148	SILAHISABUNGAN	SILALAH III	5
149	SIEMPAT NEMPU	SIHORBO	5
150	SIEMPAT NEMPU HULU	SIPOLTONG	5
151	PEGAGAN HILIR	BUKIT BARU	5
152	TANAH PINEM	RENUN	5
153	TANAH PINEM	BALANDUA	5
154	SIDIKALANG	BATANG BERUH	6
155	SIDIKALANG	KOTA SIDIKALANG	6
156	SIDIKALANG	BELANG MALUM	6
157	SIDIKALANG	HUTA RAKJAT	6
158	BERAMPU	BERAMPU	6
159	SITINJO	SITINJO	6
160	SUMBUL	PEGAGAN JULU I	6
161	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	PARONGIL	6
162	SIEMPAT NEMPU	BUNTU RAJA	6
163	SIEMPAT NEMPU HILIR	SOPO BUTAR	6
164	TIGA LINGGA	TIGALINGGA	6
165	GUNUNG SITEMBER	GUNUNG SITEMBER	6
166	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA	6
167	TANAH PINEM	PASIR TENGAH	6
168	TANAH PINEM	KUTA BULUH	6
169	TANAH PINEM	KUTA GAMBER	6



## 2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 50,30 %. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan. Kebijakan kabupaten mengenai ketersediaan pangan pada periode 2019-2023 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan pertanian; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- (i) Peningkatan produktivitas
  - a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
  - b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
  - c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
  - d. Pengelolaan air
  - e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
- (ii) Perluasan lahan sawah
  - a. Pengembangan lahan sawah
  - b. Optimalisasi penggunaan lahan
  - c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
  - d. Pembangunan sumur pompa dan dam/embung
- (iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko
  - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
  - b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen
- (iv) Penguatan kelembagaan bagi petani
  - a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
  - b. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat
  - c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
  - d. Pemasaran produk pertanian, misal TTI, dll

### BAB III KETERSEDIAAN PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik:** keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

#### 3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Dairi Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Dairi terus mengalami penurunan dari 7,70% (284,304 jiwa) tahun 2019 menjadi 4,47% (324.747 jiwa) tahun 2023

**Tabel 3.1.1** Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Dairi

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk miskin	7,70	8,04	<b>8,31</b>	<b>7,88</b>	<b>4,47</b>

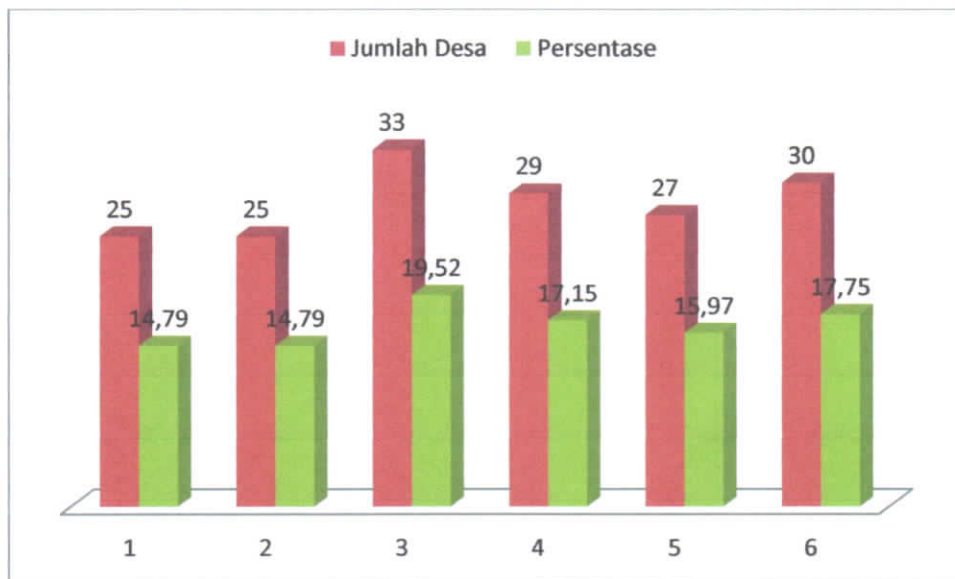
Sumber: Dairi Dalam Angka 2019-2023, BPS

Pada tingkat desa berdasarkan data Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2023, terdapat 25 desa yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah 14,79% (Prioritas 1). Sebanyak 25 desa (14,79%) masuk prioritas 2, dan 33 desa (19,52%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 25 desa tersebut.

**Tabel 3.1.2** Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala rioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,0450$	25	14,79
2	$0,0213 < 0,0404$	25	14,79
3	$0,0115 < 0,0244$	33	19,52
4	$0,0589 < 0,0368$	29	17,15
5	$0,0387 < 0,0589$	27	15,97
6	$< 0,0387$	30	17,75

**Gambar 3.1.1.** Rasio Kesejahteraan terendah berdasarkan Skala Prioritas



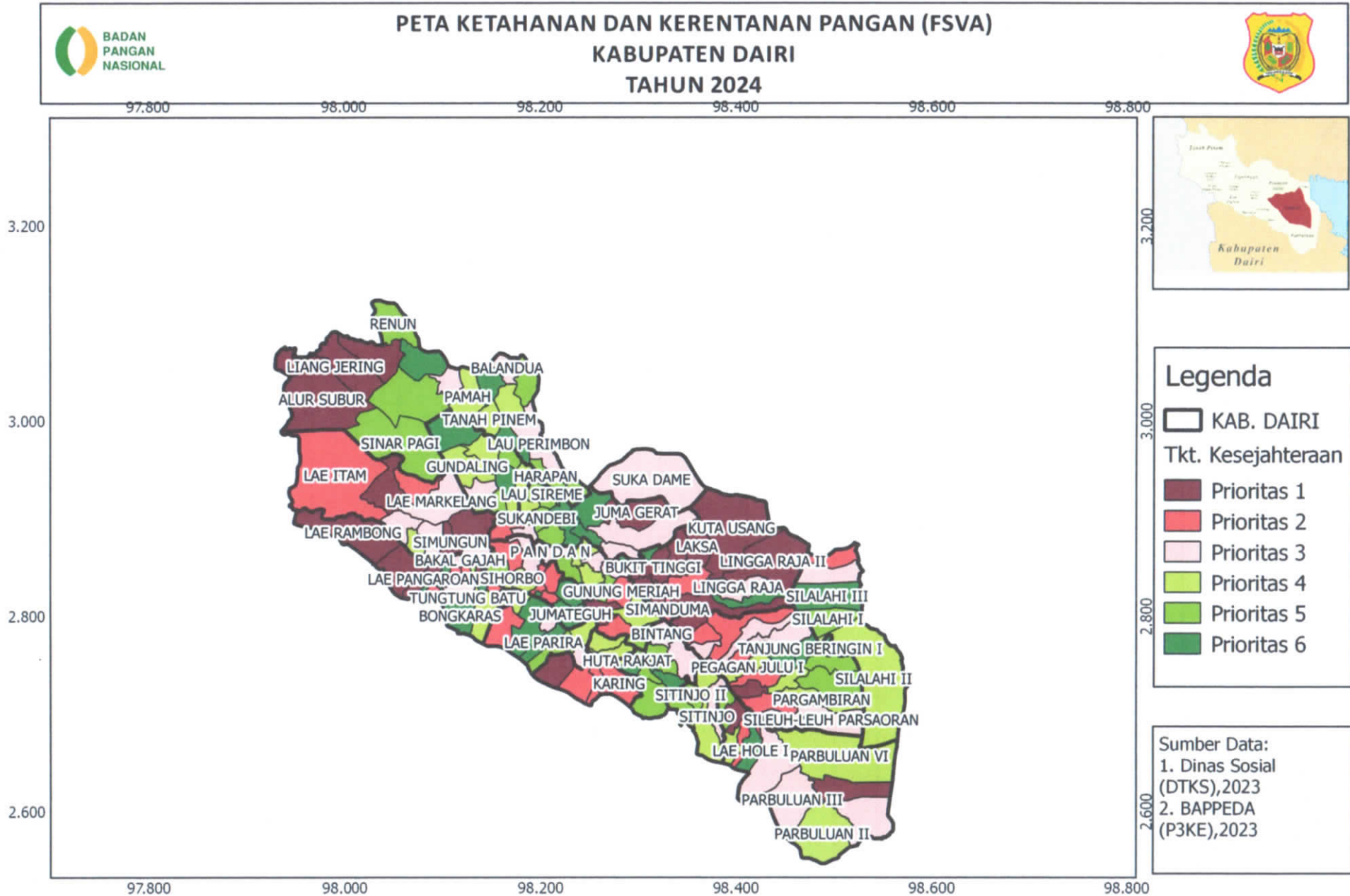
**Tabel 3.1.3.** Skala Prioritas Indikator Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Rasio Pddk Tidak Sejahtera
1	BERAMPU	SAMBALIANG	1
2	PARBULUAN	PARBULUAN V	1
3	PARBULUAN	B A N G U N	1
4	SUMBUL	PEGAGAN JULU X	1
5	SUMBUL	KUTA GUGUNG	1
6	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE RAMBONG	1
7	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE AMBAT	1
8	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SIRATAH	1
9	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE PANGAROAN	1
10	SIEMPAT NEMPU HULU	TAMBAHAN	1
11	SIEMPAT NEMPU HILIR	SIMUNGUN	1
12	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE LUHUNG	1
13	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE SERING	1
14	TIGA LINGGA	JUMA GREAT	1
15	PEGAGAN HILIR	TANJUNG SALUKSUK	1
16	PEGAGAN HILIR	BUKIT TINGGI	1
17	PEGAGAN HILIR	LAKSA	1
18	PEGAGAN HILIR	SIMARTUGAN	1
19	PEGAGAN HILIR	PERIK MBUE	1

20	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA II	1
21	PEGAGAN HILIR	MBINANGA	1
22	PEGAGAN HILIR	KUTA USANG	1
23	TANAH PINEM	LAU NJUHAR	1
24	TANAH PINEM	LIANG JERING	1
25	TANAH PINEM	ALUR SUBUR	1
26	BERAMPU	KARING	2
27	BERAMPU	BANJAR TOBA	2
28	BERAMPU	PASI	2
29	PARBULUAN	LAE HOLE	2
30	SUMBUL	PEGAGAN JULU V	2
31	SUMBUL	PEGAGAN JULU II	2
32	SUMBUL	PEGAGAN JULU III	2
33	SUMBUL	PEGAGAN JULU VII	2
34	SUMBUL	PEGAGAN JULU IX	2
35	SILAHISABUNGAN	PAROPO I	2
36	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SUMBARI	2
37	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	URUK BELIN	2
38	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	POLLING ANAK-ANAK	2
39	LAE PARIRA	PANDIANGAN	2
40	SIEMPAT NEMPU	GOMIT	2
41	SIEMPAT NEMPU	JUMASIULOK	2
42	SIEMPAT NEMPU	MAJU	2
43	SIEMPAT NEMPU	ADIAN GUPA	2
44	SIEMPAT NEMPU HULU	KUTA TENGAH	2
45	SIEMPAT NEMPU HULU	GUNUNG MERIAH	2
46	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE ITAM	2
47	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE HAPORAS	2
48	TIGA LINGGA	LAU PAKPAK	2
49	PEGAGAN HILIR	SIMANDUMA	2
50	PEGAGAN HILIR	ONAN LAMA	2
51	SIDIKALANG	BINTANG HULU	3
52	SIDIKALANG	BINTANG	3
53	SITINJO	SITINJO I	3
54	PARBULUAN	PARBULUAN I	3
55	PARBULUAN	PARBULUAN III	3
56	PARBULUAN	PARBULUAN IV	3
57	SUMBUL	PEGAGAN JULU VI	3
58	SUMBUL	PEGAGAN JULU VIII	3
59	SUMBUL	DOLOK TOLONG	3
60	SUMBUL	SILEUH-LEUH PARSAORAN	3
61	SUMBUL	PANGGURUAN	3
62	SILAHISABUNGAN	PAROPO	3
63	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BAKAL GAJAH	3
64	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BONIAN	3
65	LAE PARIRA	SUMBUL	3
66	LAE PARIRA	BULU DURI	3
67	SIEMPAT NEMPU	SOBAN	3
68	SIEMPAT NEMPU HULU	SIGAMBIR GAMBIR	3
69	SIEMPAT NEMPU HULU	BAKAL JULU	3
70	SIEMPAT NEMPU HULU	P A N D A N	3
71	SIEMPAT NEMPU HILIR	PARDOMUAN	3
72	SIEMPAT NEMPU HILIR	JAMBUR INDONESIA	3
73	SIEMPAT NEMPU HILIR	J A N J I	3

74	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE MARKELANG	3
75	TIGA LINGGA	SUMBUL TENGAH	3
76	TIGA LINGGA	UJUNG TERAN	3
77	TIGA LINGGA	LAU MOLGAP	3
78	GUNUNG SITEMBER	KENDIT LIANG	3
79	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA	3
80	TANAH PINEM	LAU PERIMBON	3
81	TANAH PINEM	SUKA DAME	3
82	TANAH PINEM	BALANDUA	3
83	TANAH PINEM	PASIR MBELANG	3
84	SIDIKALANG	HUTA RAKJAT	4
85	SITINJO	SITINJO	4
86	PARBULUAN	PARBULUAN II	4
87	PARBULUAN	PARBULUAN VI	4
88	PARBULUAN	LAE HOLE II	4
89	SUMBUL	PEGAGAN JULU IV	4
90	SUMBUL	PEGAGAN JULU I	4
91	SUMBUL	PARGAMBIRAN	4
92	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	4
93	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SIBORAS	4
94	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LONGKOTAN	4
95	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	PALIPI	4
96	LAE PARIRA	LUMBAN SIHITE	4
97	LAE PARIRA	KABAN JULU	4
98	SIEMPAT NEMPU	SIHORBO	4
99	SIEMPAT NEMPU	ADIAN NANGKA	4
100	SIEMPAT NEMPU	SOSORLONTUNG	4
101	SIEMPAT NEMPU	HUTA IMBARU	4
102	SIEMPAT NEMPU HULU	SUNGAI RAYA	4
103	SIEMPAT NEMPU HULU	PANGARIBUAN	4
104	SIEMPAT NEMPU HULU	SIPOLTONG	4
105	SIEMPAT NEMPU HILIR	SOPO BUTAR	4
106	TIGA LINGGA	LAU MIL	4
107	GUNUNG SITEMBER	BATU GUNGUN	4
108	GUNUNG SITEMBER	GUNDALING	4
109	GUNUNG SITEMBER	RANTE BESI	4
110	TANAH PINEM	PAMAH	4
111	TANAH PINEM	TANAH PINEM	4
112	TANAH PINEM	KEMPAWA	4
113	SIDIKALANG	SIDIANGKAT	5
114	SIDIKALANG	KALANG SIMBARA	5
115	SIDIKALANG	KALANG	5
116	SIDIKALANG	BELANG MALUM	5
117	SIDIKALANG	BINTANG MERSADA	5
118	SITINJO	PANJI DABUTAR	5
119	SITINJO	SITINJO II	5
120	PARBULUAN	BANGUN I	5
121	SUMBUL	PERJUANGAN	5
122	SUMBUL	BARISAN NAULI	5
123	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	5
124	LAE PARIRA	KENTARA	5
125	SIEMPAT NEMPU	SINAMPANG	5
126	SIEMPAT NEMPU HULU	LAE NUAHA	5
127	SIEMPAT NEMPU HULU	SILUMBOYAH	5

128	SIEMPAT NEMPU HULU	TUALANG	5
129	TIGA LINGGA	BERTUNGEN JULU	5
130	TIGA LINGGA	SUKANDEBI	5
131	TIGA LINGGA	LAU SIREME	5
132	GUNUNG SITEMBER	BUKIT LAU KERSIK	5
133	GUNUNG SITEMBER	TUPAK RAJA	5
134	TANAH PINEM	RENUN	5
135	TANAH PINEM	PASIR TENGAH	5
136	TANAH PINEM	KUTA GAMBER	5
137	TANAH PINEM	HARAPAN	5
138	TANAH PINEM	GUNUNG TUA	5
139	TANAH PINEM	SINAR PAGI	5
140	SIDIKALANG	BATANG BERUH	6
141	SIDIKALANG	KOTA SIDIKALANG	6
142	SIDIKALANG	KUTA GAMBIR	6
143	BERAMPU	BERAMPU	6
144	PARBULUAN	LAE HOLE I	6
145	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN	6
146	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN I	6
147	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	6
148	SILIMA PUNGA-PUNGA	LAE PANGINUMAN	6
149	SILIMA PUNGA-PUNGA	BONGKARAS	6
150	SILIMA PUNGA-PUNGA	TUNGTUNG BATU	6
151	SILIMA PUNGA-PUNGA	PARONGIL	6
152	LAE PARIRA	LAE PARIRA	6
153	LAE PARIRA	SEMPUNG POLLING	6
154	LAE PARIRA	LUMBAN TORUAN	6
155	SIEMPAT NEMPU	BUNTU RAJA	6
156	SIEMPAT NEMPU	JUMANTUANG	6
157	SIEMPAT NEMPU	JUMATEGUH	6
158	TIGA LINGGA	SARINTONU	6
159	TIGA LINGGA	PALDING	6
160	TIGA LINGGA	LAU BAGOT	6
161	TIGA LINGGA	TIGALINGGA	6
162	TIGA LINGGA	PALDING JAYA	6
163	GUNUNG SITEMBER	GUNUNG SITEMBER	6
164	GUNUNG SITEMBER	LAU LEBAH	6
165	PEGAGAN HILIR	BANDAR HUTA USANG	6
166	PEGAGAN HILIR	BUKIT BARU	6
167	TANAH PINEM	KUTA BULUH	6
168	TANAH PINEM	LAU TAWAR	6
169	TANAH PINEM	MANGAN MOLIH	6



### 3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

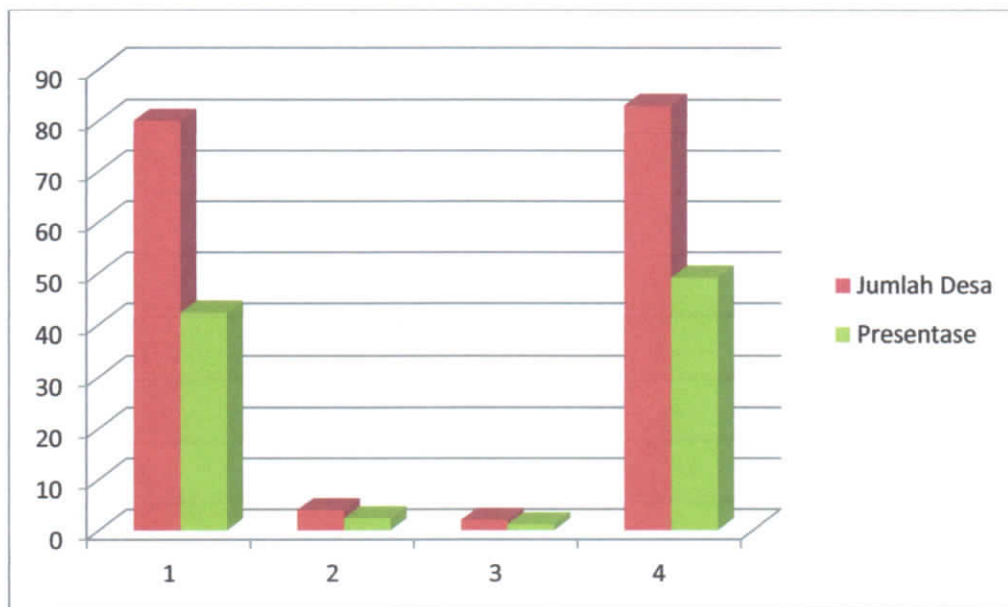
Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi kehidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2018, BPS, di Kabupaten Dairi, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, pasang, dll) terdapat di Kecamatan Kecamatan Tanah Pinem (Desa Renun, Pasir tengah, Kempawa, Kuta Gamber, Lau Primbon, Suka Dame, Mangan Molih, Lau Njuhar, Liang jering, Alur Subur, Pasir Mbelang, Sinar Pagi).

**Tabel 4.2.1.** Sebaran desa rasio akses penghubung berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Nilai Kategorik	Jumlah Desa	Presentase	Keterangan
1	4	80	42,33	Tidak dapat dilalui sepanjang tahun
2	3	4	2,36	Bisa dilalui sepanjang tahun kecuali musim hujan
3	2	2	1,18	Bisa dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan dll)
4	1	83	49,11	Bisa dilalui sepanjang tahun

**Gambar.4.2.1.** Sebaran desa rasio akses penghubung berdasarkan skala prioritas



**Tabel 4.2.2.** Skala Prioritas Indikator Desa yang tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat, Air, atau Udara.

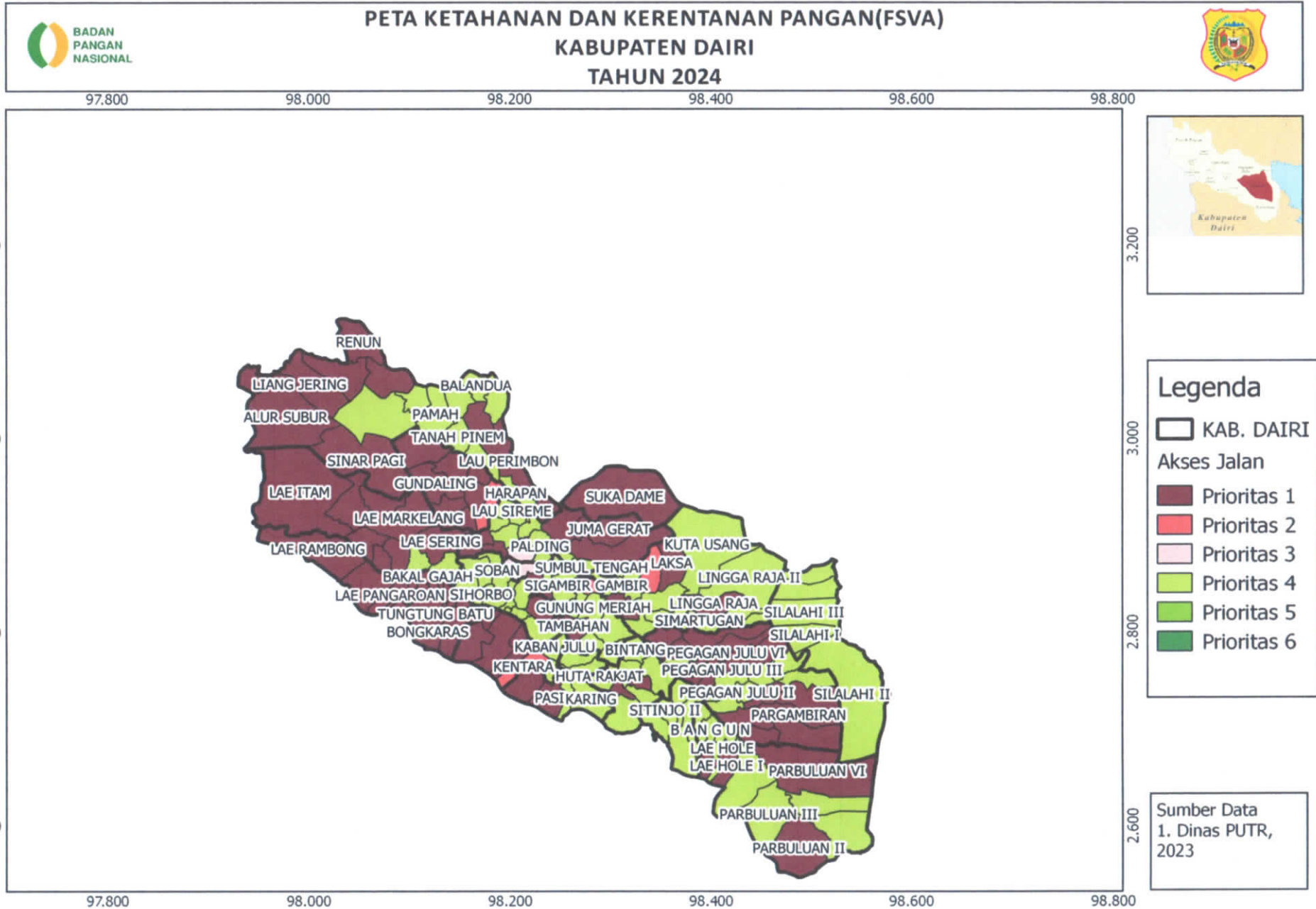
No.	Nama Kec	Nama Desa	P.Jalan
1	SIDIKALANG	KALANG SIMBARA	1
2	SIDIKALANG	BELANG MALUM	1
3	BERAMPU	PASI	1
4	BERAMPU	SAMBALIANG	1
5	PARBULUAN	PARBULUAN II	1
6	PARBULUAN	PARBULUAN VI	1
7	PARBULUAN	LAE HOLE I	1
8	PARBULUAN	LAE HOLE II	1

9	SUMBUL	PEGAGAN JULU V	1
10	SUMBUL	PEGAGAN JULU IV	1
11	SUMBUL	PEGAGAN JULU III	1
12	SUMBUL	PEGAGAN JULU VI	1
13	SUMBUL	PEGAGAN JULU VII	1
14	SUMBUL	PEGAGAN JULU IX	1
15	SUMBUL	PEGAGAN JULU X	1
16	SUMBUL	DOLOK TOLONG	1
17	SUMBUL	PARGAMBIAN	1
18	SUMBUL	PERJUANGAN	1
19	SUMBUL	SILEUH-LEUH PARSAORAN	1
20	SUMBUL	PANGGURUAN	1
21	SILIMA PUNGA-PUNGA	LAE RAMBONG	1
22	SILIMA PUNGA-PUNGA	LAE AMBAT	1
23	SILIMA PUNGA-PUNGA	LAE PANGINUMAN	1
24	SILIMA PUNGA-PUNGA	SUMBARI	1
25	SILIMA PUNGA-PUNGA	BAKAL GAJAH	1
26	SILIMA PUNGA-PUNGA	URUK BELIN	1
27	SILIMA PUNGA-PUNGA	SIBORAS	1
28	SILIMA PUNGA-PUNGA	BONIAN	1
29	SILIMA PUNGA-PUNGA	BONGKARAS	1
30	SILIMA PUNGA-PUNGA	TUNGTUNG BATU	1
31	SILIMA PUNGA-PUNGA	LONGKOTAN	1
32	SILIMA PUNGA-PUNGA	PARONGIL	1
33	SILIMA PUNGA-PUNGA	SIRATAH	1
34	SILIMA PUNGA-PUNGA	POLLING ANAK-ANAK	1
35	SILIMA PUNGA-PUNGA	PALUPI	1
36	SILIMA PUNGA-PUNGA	LAE PANGAROAN	1
37	LAE PARIRA	LAE PARIRA	1
38	LAE PARIRA	BULU DURI	1
39	LAE PARIRA	SEMPUNG POLLING	1
40	LAE PARIRA	PANDIANGAN	1
41	LAE PARIRA	LUMBAN SIHITE	1
42	LAE PARIRA	LUMBAN TORUAN	1
43	SIEMPAT NEMPU	JUMANTUANG	1
44	SIEMPAT NEMPU HULU	TAMBAHAN	1
45	SIEMPAT NEMPU HULU	TUALANG	1
46	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE ITAM	1
47	SIEMPAT NEMPU HILIR	PARDOMUAN	1
48	SIEMPAT NEMPU HILIR	JAMBUR INDONESIA	1
49	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE MARKELANG	1
50	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE LUHUNG	1
51	SIEMPAT NEMPU HILIR	SOPO BUTAR	1
52	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE SERING	1
53	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE HAPORAS	1
54	TIGA LINGGA	UJUNG TERAN	1
55	TIGA LINGGA	JUMA GREAT	1

56	TIGA LINGGA	SARINTONU	1
57	TIGA LINGGA	LAU MOLGAP	1
58	TIGA LINGGA	LAU PAKPAK	1
59	GUNUNG SITEMBER	BUKIT LAU KERSIK	1
60	GUNUNG SITEMBER	GUNUNG SITEMBER	1
61	GUNUNG SITEMBER	GUNDALING	1
62	GUNUNG SITEMBER	RANTE BESI	1
63	GUNUNG SITEMBER	KENDIT LIANG	1
64	GUNUNG SITEMBER	LAU LEBAH	1
65	GUNUNG SITEMBER	TUPAK RAJA	1
66	PEGAGAN HILIR	TANJUNG SALUKSUK	1
67	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA	1
68	PEGAGAN HILIR	LAKSA	1
69	PEGAGAN HILIR	PERIK MBUE	1
70	TANAH PINEM	RENUN	1
71	TANAH PINEM	KEMPAWA	1
72	TANAH PINEM	LAU PERIMBON	1
73	TANAH PINEM	GUNUNG TUA	1
74	TANAH PINEM	SUKA DAME	1
75	TANAH PINEM	MANGAN MOLIH	1
76	TANAH PINEM	LAU NJUHAR	1
77	TANAH PINEM	LIANG JERING	1
78	TANAH PINEM	ALUR SUBUR	1
79	TANAH PINEM	SINAR PAGI	1
80	LAE PARIRA	KENTARA	2
81	SIEMPAT NEMPU HULU	SIGAMBIR GAMBIR	2
82	GUNUNG SITEMBER	BATU GUNGUN	2
83	PEGAGAN HILIR	MBINANGA	2
84	SIEMPAT NEMPU HULU	P A N D A N	3
85	TIGA LINGGA	BERTUNGEN JULU	3
86	SIDIKALANG	SIDIANGKAT	4
87	SIDIKALANG	BATANG BERUH	4
88	SIDIKALANG	BINTANG HULU	4
89	SIDIKALANG	BINTANG	4
90	SIDIKALANG	KALANG	4
91	SIDIKALANG	KOTA SIDIKALANG	4
92	SIDIKALANG	KUTA GAMBIR	4
93	SIDIKALANG	HUTA RAKJAT	4
94	SIDIKALANG	BINTANG MERSADA	4
95	BERAMPU	BERAMPU	4
96	BERAMPU	KARING	4
97	BERAMPU	BANJAR TOBA	4
98	SITINJO	SITINJO	4
99	SITINJO	PANJI DABUTAR	4
100	SITINJO	SITINJO I	4
101	SITINJO	SITINJO II	4
102	PARBULUAN	PARBULUAN I	4

103	PARBULUAN	PARBULUAN V	4
104	PARBULUAN	PARBULUAN III	4
105	PARBULUAN	PARBULUAN IV	4
106	PARBULUAN	LAE HOLE	4
107	PARBULUAN	B A N G U N	4
108	PARBULUAN	BANGUN I	4
109	SUMBUL	PEGAGAN JULU II	4
110	SUMBUL	PEGAGAN JULU I	4
111	SUMBUL	PEGAGAN JULU VIII	4
112	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN	4
113	SUMBUL	KUTA GUGUNG	4
114	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN I	4
115	SUMBUL	BARISAN NAULI	4
116	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	4
117	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	4
118	SILAHISABUNGAN	PAROPO	4
119	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	4
120	SILAHISABUNGAN	PAROPO I	4
121	LAE PARIRA	SUMBUL	4
122	LAE PARIRA	KABAN JULU	4
123	SIEMPAT NEMPU	SINAMPANG	4
124	SIEMPAT NEMPU	SIHORBO	4
125	SIEMPAT NEMPU	SOBAN	4
126	SIEMPAT NEMPU	ADIAN NANGKA	4
127	SIEMPAT NEMPU	BUNTU RAJA	4
128	SIEMPAT NEMPU	GOMIT	4
129	SIEMPAT NEMPU	JUMASIULOK	4
130	SIEMPAT NEMPU	JUMATEGUH	4
131	SIEMPAT NEMPU	SOSORLONTUNG	4
132	SIEMPAT NEMPU	HUTA IMBARU	4
133	SIEMPAT NEMPU	MAJU	4
134	SIEMPAT NEMPU	ADIAN GUPA	4
135	SIEMPAT NEMPU HULU	KUTA TENGAH	4
136	SIEMPAT NEMPU HULU	LAE NUAHA	4
137	SIEMPAT NEMPU HULU	SUNGAI RAYA	4
138	SIEMPAT NEMPU HULU	GUNUNG MERIAH	4
139	SIEMPAT NEMPU HULU	SILUMBOYAH	4
140	SIEMPAT NEMPU HULU	PANGARIBUAN	4
141	SIEMPAT NEMPU HULU	BAKAL JULU	4
142	SIEMPAT NEMPU HULU	SIPOLTONG	4
143	SIEMPAT NEMPU HILIR	SIMUMGUN	4
144	SIEMPAT NEMPU HILIR	J A N J I	4
145	TIGA LINGGA	SUMBUL TENGAH	4
146	TIGA LINGGA	PALDING	4
147	TIGA LINGGA	SUKANDEBI	4
148	TIGA LINGGA	LAU MIL	4
149	TIGA LINGGA	LAU BAGOT	4

150	TIGA LINGGA	TIGALINGGA	4
151	TIGA LINGGA	LAU SIREME	4
152	TIGA LINGGA	PALDING JAYA	4
153	PEGAGAN HILIR	SIMANDUMA	4
154	PEGAGAN HILIR	BANDAR HUTA USANG	4
155	PEGAGAN HILIR	ONAN LAMA	4
156	PEGAGAN HILIR	BUKIT TINGGI	4
157	PEGAGAN HILIR	SIMARTUGAN	4
158	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA II	4
159	PEGAGAN HILIR	BUKIT BARU	4
160	PEGAGAN HILIR	KUTA USANG	4
161	TANAH PINEM	PASIR TENGAH	4
162	TANAH PINEM	PAMAH	4
163	TANAH PINEM	KUTA BULUH	4
164	TANAH PINEM	TANAH PINEM	4
165	TANAH PINEM	KUTA GAMBER	4
166	TANAH PINEM	HARAPAN	4
167	TANAH PINEM	LAU TAWAR	4
168	TANAH PINEM	BALANDUA	4
169	TANAH PINEM	PASIR MBELANG	4



### **3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan**

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Dairi tahun 2019-2023 diantaranya:

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir
- Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan perdesaan.

## BAB IV PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

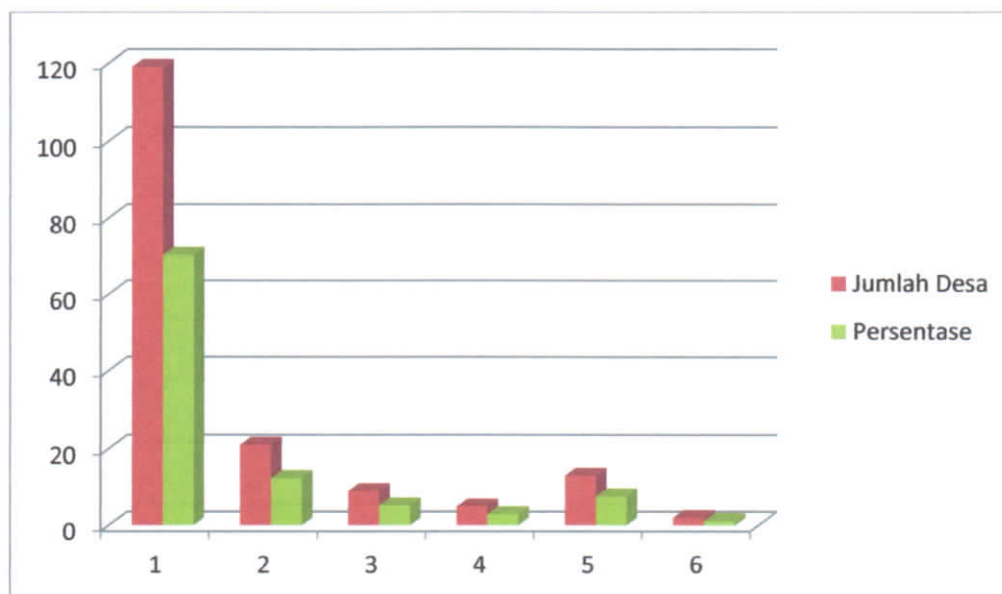
### 4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak<sup>4</sup>. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

**Tabel 4.1.1.** Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,5610$	119	70,41
2	$0,3329 < 0,5610$	21	12,42
3	$0,1989 < 0,3329$	9	5,32
4	$0,0987 < 0,1989$	5	2,95
5	$0,0000 < 0,0987$	13	7,69
6	$< 0,0000$	2	1,18

**Gambar 4.1** Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas



**4.1.2.** Skala Prioritas Indikator Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga

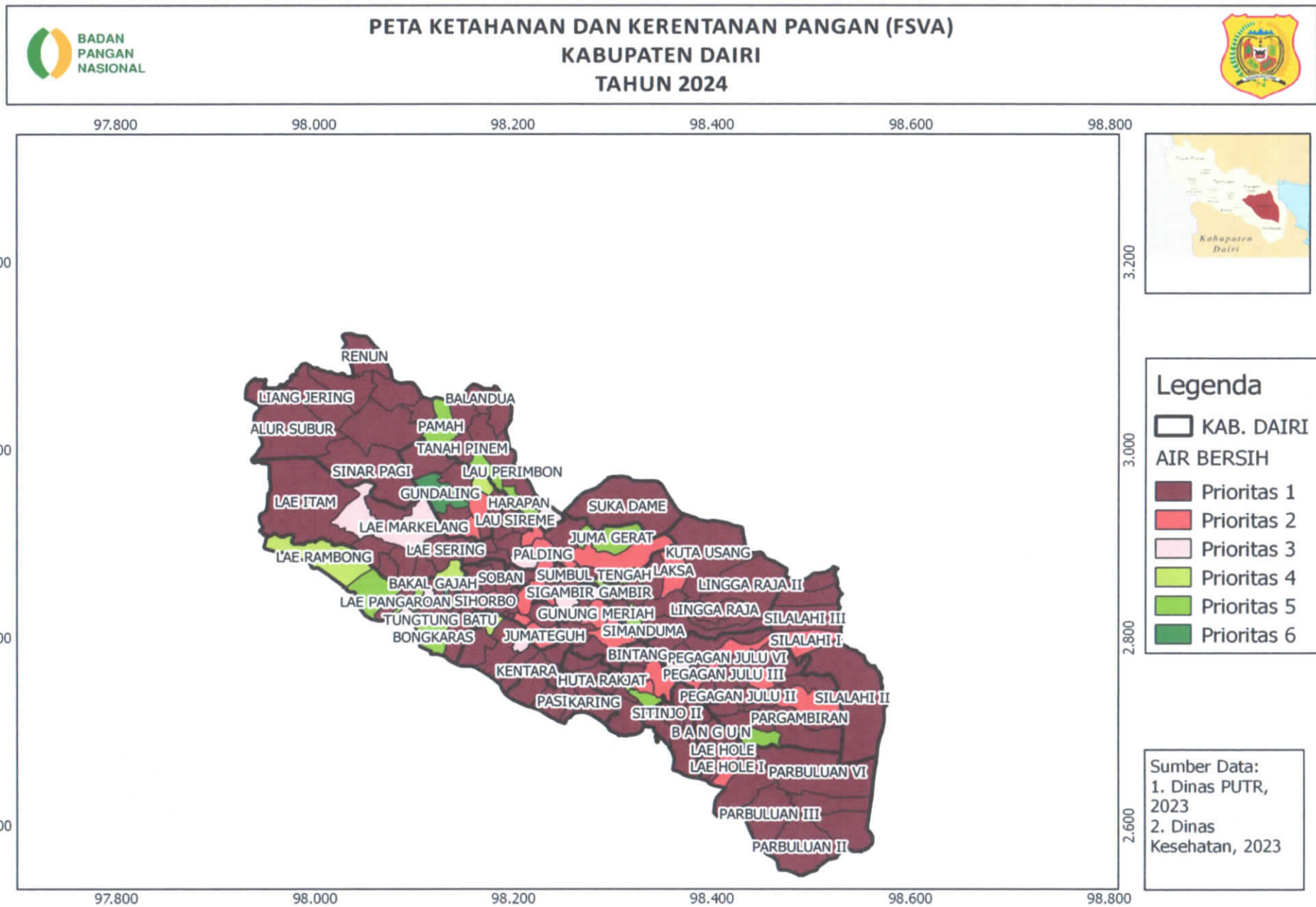
No.	Nama Kec	Nama Desa	P. No Water
1	SIDIKALANG	SIDIANGKAT	1
2	SIDIKALANG	BINTANG	1
3	SIDIKALANG	KALANG	1
4	SIDIKALANG	BELANG MALUM	1
5	SIDIKALANG	KUTA GAMBIR	1
6	SIDIKALANG	HUTA RAKJAT	1
7	SIDIKALANG	BINTANG MERSADA	1
8	BERAMPU	BERAMPU	1
9	BERAMPU	KARING	1
10	BERAMPU	BANJAR TOBA	1
11	BERAMPU	PASI	1
12	BERAMPU	SAMBALIANG	1
13	SITINJO	SITINJO	1
14	SITINJO	PANJI DABUTAR	1
15	SITINJO	SITINJO I	1
16	SITINJO	SITINJO II	1
17	PARBULUAN	PARBULUAN II	1
18	PARBULUAN	PARBULUAN I	1
19	PARBULUAN	PARBULUAN V	1
20	PARBULUAN	PARBULUAN III	1
21	PARBULUAN	PARBULUAN IV	1
22	PARBULUAN	PARBULUAN VI	1

23	PARBULUAN	LAE HOLE	1
24	PARBULUAN	B A N G U N	1
25	PARBULUAN	LAE HOLE II	1
26	PARBULUAN	BANGUN I	1
27	SUMBUL	PEGAGAN JULU V	1
28	SUMBUL	PEGAGAN JULU IV	1
29	SUMBUL	PEGAGAN JULU II	1
30	SUMBUL	PEGAGAN JULU I	1
31	SUMBUL	PEGAGAN JULU III	1
32	SUMBUL	PEGAGAN JULU VII	1
33	SUMBUL	PEGAGAN JULU IX	1
34	SUMBUL	PEGAGAN JULU X	1
35	SUMBUL	DOLOK TOLONG	1
36	SUMBUL	KUTA GUGUNG	1
37	SUMBUL	PARGAMBIAN	1
38	SUMBUL	SILEUH-LEUH PARSAORAN	1
39	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN I	1
40	SUMBUL	BARISAN NAULI	1
41	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	1
42	SILAHISABUNGAN	PAROPO	1
43	SILAHISABUNGAN	SILALAH II	1
44	SILAHISABUNGAN	PAROPO I	1
45	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BAKAL GAJAH	1
46	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	URUK BELIN	1
47	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BONIAN	1
48	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	TUNGTUNG BATU	1
49	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LONGKOTAN	1
50	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	PARONGIL	1
51	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SIRATAH	1
52	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	POLLING ANAK-ANAK	1
53	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE PANGAROAN	1
54	LAE PARIRA	SUMBUL	1
55	LAE PARIRA	KENTARA	1
56	LAE PARIRA	LAE PARIRA	1
57	LAE PARIRA	SEMPUNG POLLING	1
58	LAE PARIRA	PANDIANGAN	1
59	LAE PARIRA	KABAN JULU	1
60	SIEMPAT NEMPU	SINAMPANG	1
61	SIEMPAT NEMPU	SOBAN	1
62	SIEMPAT NEMPU	ADIAN NANGKA	1
63	SIEMPAT NEMPU	BUNTU RAJA	1
64	SIEMPAT NEMPU	JUMANTUANG	1
65	SIEMPAT NEMPU	SOSORLONTUNG	1
66	SIEMPAT NEMPU	HUTA IMBARU	1
67	SIEMPAT NEMPU	MAJU	1
68	SIEMPAT NEMPU	ADIAN GUPA	1
69	SIEMPAT NEMPU HULU	TAMBAHAN	1

70	SIEMPAT NEMPU HULU	KUTA TENGAH	1
71	SIEMPAT NEMPU HULU	LAE NUAHA	1
72	SIEMPAT NEMPU HULU	SILUMBOYAH	1
73	SIEMPAT NEMPU HULU	BAKAL JULU	1
74	SIEMPAT NEMPU HULU	SIPOLTONG	1
75	SIEMPAT NEMPU HULU	P A N D A N	1
76	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE ITAM	1
77	SIEMPAT NEMPU HILIR	PARDOMUAN	1
78	SIEMPAT NEMPU HILIR	JAMBUR INDONESIA	1
79	SIEMPAT NEMPU HILIR	SIMUNGUN	1
80	SIEMPAT NEMPU HILIR	SOPO BUTAR	1
81	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE SERING	1
82	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE HAPORAS	1
83	TIGA LINGGA	SUMBUL TENGAH	1
84	TIGA LINGGA	SARINTONU	1
85	TIGA LINGGA	SUKANDEBI	1
86	TIGA LINGGA	LAU MOLGAP	1
87	TIGA LINGGA	LAU PAKPAK	1
88	TIGA LINGGA	LAU MIL	1
89	TIGA LINGGA	TIGALINGGA	1
90	TIGA LINGGA	LAU SIREME	1
91	GUNUNG SITEMBER	BATU GUNGUN	1
92	GUNUNG SITEMBER	RANTE BESI	1
93	GUNUNG SITEMBER	KENDIT LIANG	1
94	GUNUNG SITEMBER	LAU LEBAH	1
95	PEGAGAN HILIR	TANJUNG SALUKSUK	1
96	PEGAGAN HILIR	SIMANDUMA	1
97	PEGAGAN HILIR	BANDAR HUTA USANG	1
98	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA	1
99	PEGAGAN HILIR	ONAN LAMA	1
100	PEGAGAN HILIR	BUKIT TINGGI	1
101	PEGAGAN HILIR	SIMARTUGAN	1
102	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA II	1
103	PEGAGAN HILIR	MBINANGA	1
104	PEGAGAN HILIR	KUTA USANG	1
105	TANAH PINEM	RENUN	1
106	TANAH PINEM	PASIR TENGAH	1
107	TANAH PINEM	KUTA BULUH	1
108	TANAH PINEM	TANAH PINEM	1
109	TANAH PINEM	KEMPAWA	1
110	TANAH PINEM	KUTA GAMBER	1
111	TANAH PINEM	LAU PERIMBON	1
112	TANAH PINEM	SUKA DAME	1
113	TANAH PINEM	MANGAN MOLIH	1
114	TANAH PINEM	LAU NJUHAR	1
115	TANAH PINEM	LIANG JERING	1
116	TANAH PINEM	ALUR SUBUR	1

117	TANAH PINEM	BALANDUA	1
118	TANAH PINEM	PASIR MBELANG	1
119	TANAH PINEM	SINAR PAGI	1
120	SIDIKALANG	BINTANG HULU	2
121	SIDIKALANG	KALANG SIMBARA	2
122	PARBULUAN	LAE HOLE I	2
123	SUMBUL	PEGAGAN JULU VI	2
124	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN	2
125	SUMBUL	PERJUANGAN	2
126	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	2
127	SIEMPAT NEMPU	SIHORBO	2
128	SIEMPAT NEMPU	GOMIT	2
129	SIEMPAT NEMPU	JUMASIULOK	2
130	SIEMPAT NEMPU	JUMATEGUH	2
131	SIEMPAT NEMPU HULU	SUNGAI RAYA	2
132	SIEMPAT NEMPU HULU	GUNUNG MERIAH	2
133	SIEMPAT NEMPU HULU	TUALANG	2
134	TIGA LINGGA	UJUNG TERAN	2
135	TIGA LINGGA	PALDING	2
136	TIGA LINGGA	LAU BAGOT	2
137	TIGA LINGGA	PALDING JAYA	2
138	GUNUNG SITEMBER	BUKIT LAU KERSIK	2
139	GUNUNG SITEMBER	GUNUNG SITEMBER	2
140	PEGAGAN HILIR	LAKSA	2
141	SUMBUL	PEGAGAN JULU VIII	3
142	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SUMBARI	3
143	LAE PARIRA	BULU DURI	3
144	SIEMPAT NEMPU HULU	SIGAMBIR GAMBIR	3
145	SIEMPAT NEMPU HULU	PANGARIBUAN	3
146	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE MARKELANG	3
147	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE LUHUNG	3
148	TIGA LINGGA	BERTUNGEN JULU	3
149	TANAH PINEM	GUNUNG TUA	3
150	SIDIKALANG	KOTA SIDIKALANG	4
151	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE RAMBONG	4
152	LAE PARIRA	LUMBAN SIHITE	4
153	SIEMPAT NEMPU HILIR	J A N J I	4
154	GUNUNG SITEMBER	TUPAK RAJA	4
155	SIDIKALANG	BATANG BERUH	5
156	SUMBUL	PANGGURUAN	5
157	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE AMBAT	5
158	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE PANGINUMAN	5
159	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BONGKARAS	5
160	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	PALUPI	5
161	LAE PARIRA	LUMBAN TORUAN	5
162	TIGA LINGGA	JUMA GERAT	5
163	PEGAGAN HILIR	PERIK MBUE	5

164	PEGAGAN HILIR	BUKIT BARU	5
165	TANAH PINEM	PAMAH	5
166	TANAH PINEM	HARAPAN	5
167	TANAH PINEM	LAU TAWAR	5
168	SILIMA PUNGA-PUNGA	SIBORAS	6
169	GUNUNG SITEMBER	GUNDALING	6



## 4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

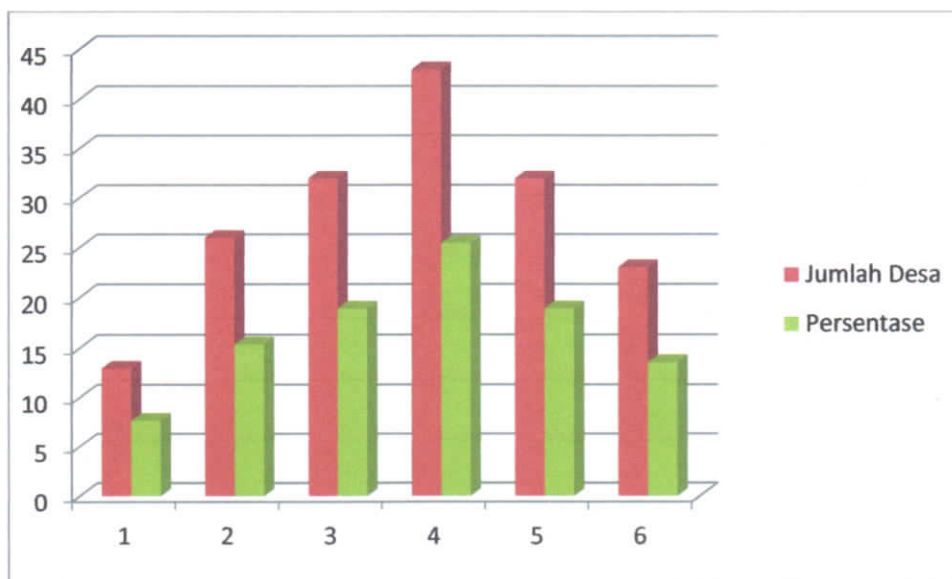
Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

**Tabel 4.2.** Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 15,6904$	13	7,69
2	$7,7721 < 15,6904$	26	15,38
3	$4,1856 < 7,7721$	32	18,93
4	$2,2724 < 4,1856$	43	25,44
5	$0,8894 < 2,2724$	32	18,93
6	$< 0,8894$	23	13,60

**Gambar 4.2.** Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas



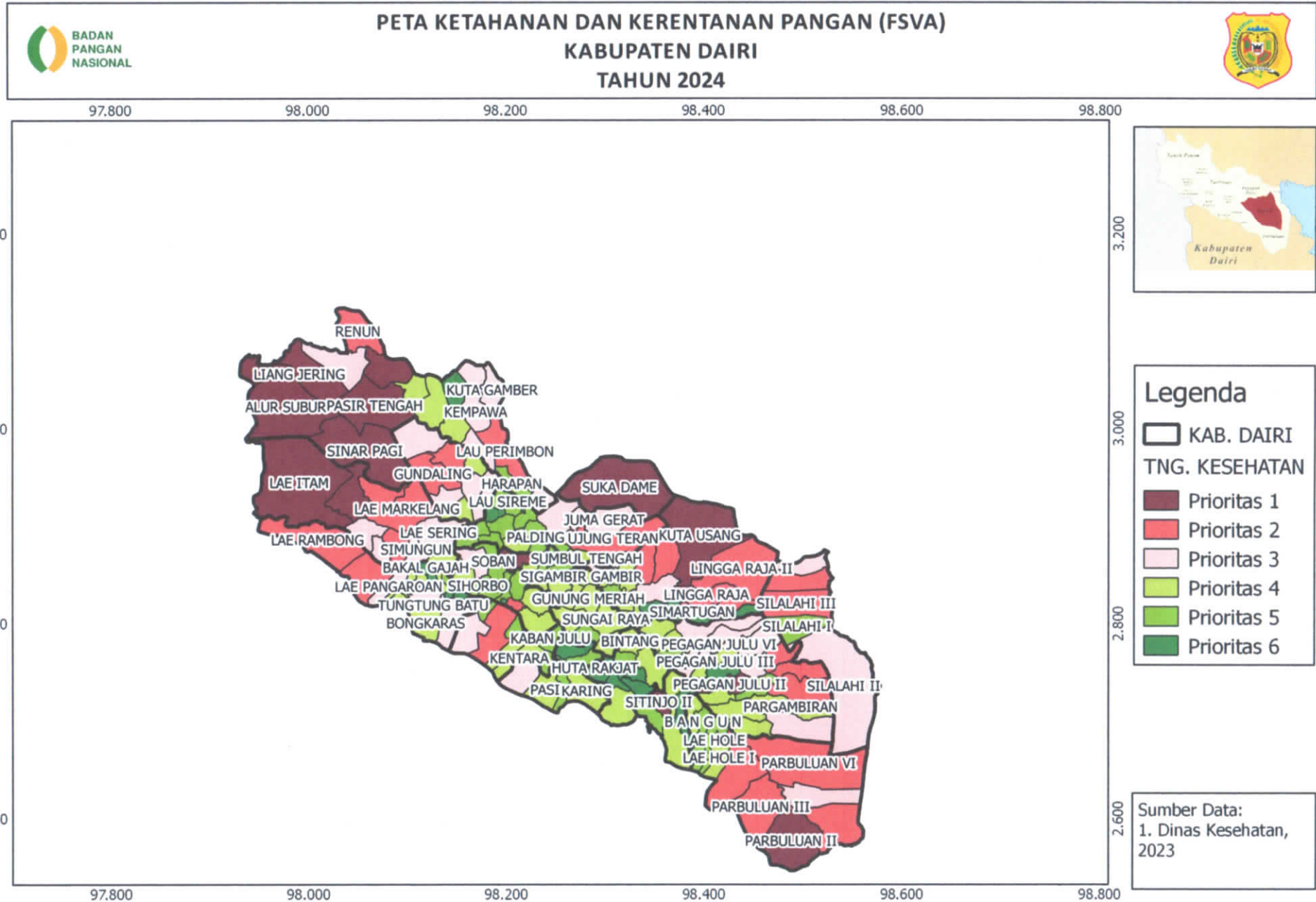
**Tabel 4.2.2.** Skala Prioritas Indikator Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk

No.	Nama Kec	Nama Desa	6. P.Tenkes
1	SITINJO	SITINJO II	1
2	PARBULUAN	PARBULUAN II	1
3	SUMBUL	PEGAGAN JULU II	1
4	SIEMPAT NEMPU HULU	P A N D A N	1
5	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE ITAM	1
6	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE LUHUNG	1
7	PEGAGAN HILIR	KUTA USANG	1
8	TANAH PINEM	PASIR TENGAH	1
9	TANAH PINEM	SUKA DAME	1
10	TANAH PINEM	MANGAN MOLIH	1
11	TANAH PINEM	LIANG JERING	1
12	TANAH PINEM	ALUR SUBUR	1
13	TANAH PINEM	SINAR PAGI	1
14	PARBULUAN	PARBULUAN I	2
15	PARBULUAN	PARBULUAN III	2
16	PARBULUAN	PARBULUAN IV	2
17	PARBULUAN	PARBULUAN VI	2
18	SUMBUL	PERJUANGAN	2
19	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN I	2
20	SUMBUL	BARISAN NAULI	2
21	SILAHISABUNGAN	PAROPO	2
22	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	2
23	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE RAMBONG	2
24	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE AMBAT	2
25	LAE PARIRA	SEMPUNG POLLING	2
26	SIEMPAT NEMPU	JUMASIULOK	2
27	SIEMPAT NEMPU HILIR	JAMBUR INDONESIA	2
28	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE MARKELANG	2
29	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE HAPORAS	2
30	TIGA LINGGA	UJUNG TERAN	2
31	GUNUNG SITEMBER	GUNDALING	2
32	GUNUNG SITEMBER	RANTE BESI	2
33	PEGAGAN HILIR	BANDAR HUTA USANG	2
34	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA	2
35	PEGAGAN HILIR	LAKSA	2
36	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA II	2
37	PEGAGAN HILIR	MBINANGA	2
38	TANAH PINEM	RENUN	2
39	TANAH PINEM	LAU PERIMBON	2
40	BERAMPU	SAMBALIANG	3
41	PARBULUAN	PARBULUAN V	3
42	SUMBUL	PEGAGAN JULU VI	3

43	SUMBUL	PEGAGAN JULU VII	3
44	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN	3
45	SUMBUL	DOLOK TOLONG	3
46	SUMBUL	SILEUH-LEUH PARSAORAN	3
47	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	3
48	SILAHISABUNGAN	PAROPO I	3
49	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BONIAN	3
50	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LONGKOTAN	3
51	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE PANGAROAN	3
52	LAE PARIRA	PANDIANGAN	3
53	SIEMPAT NEMPU	MAJU	3
54	SIEMPAT NEMPU HILIR	PARDOMUAN	3
55	SIEMPAT NEMPU HILIR	SIMUMUN	3
56	SIEMPAT NEMPU HILIR	SOPO BUTAR	3
57	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE SERING	3
58	TIGA LINGGA	JUMA GERAT	3
59	TIGA LINGGA	SARINTONU	3
60	GUNUNG SITEMBER	GUNUNG SITEMBER	3
61	GUNUNG SITEMBER	BATU GUNGUN	3
62	GUNUNG SITEMBER	KENDIT LIANG	3
63	GUNUNG SITEMBER	LAU LEBAH	3
64	PEGAGAN HILIR	ONAN LAMA	3
65	PEGAGAN HILIR	BUKIT BARU	3
66	TANAH PINEM	KEMPAWA	3
67	TANAH PINEM	KUTA GAMBER	3
68	TANAH PINEM	GUNUNG TUA	3
69	TANAH PINEM	LAU TAWAR	3
70	TANAH PINEM	LAU NJUHAR	3
71	TANAH PINEM	BALANDUA	3
72	SIDIKALANG	SIDIANGKAT	4
73	SIDIKALANG	BINTANG HULU	4
74	SIDIKALANG	BINTANG	4
75	BERAMPU	KARING	4
76	BERAMPU	PASI	4
77	SITINJO	SITINJO	4
78	PARBULUAN	LAE HOLE I	4
79	PARBULUAN	BANGUN I	4
80	SUMBUL	PEGAGAN JULU V	4
81	SUMBUL	PEGAGAN JULU III	4
82	SUMBUL	PEGAGAN JULU IX	4
83	SUMBUL	PEGAGAN JULU X	4
84	SUMBUL	KUTA GUGUNG	4
85	SUMBUL	PARGAMBIRAN	4
86	SUMBUL	PANGGURUAN	4
87	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	LAE PANGINUMAN	4
88	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SUMBARI	4

89	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SIBORAS	4
90	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BONGKARAS	4
91	LAE PARIRA	KENTARA	4
92	LAE PARIRA	LAE PARIRA	4
93	SIEMPAT NEMPU	SINAMPANG	4
94	SIEMPAT NEMPU	JUMANTUANG	4
95	SIEMPAT NEMPU	JUMATEGUH	4
96	SIEMPAT NEMPU HULU	TAMBAHAN	4
97	SIEMPAT NEMPU HULU	LAE NUAHA	4
98	SIEMPAT NEMPU HULU	SUNGAI RAYA	4
99	SIEMPAT NEMPU HULU	GUNUNG MERIAH	4
100	SIEMPAT NEMPU HULU	SIGAMBIR GAMBIR	4
101	SIEMPAT NEMPU HULU	SILUMBOYAH	4
102	SIEMPAT NEMPU HULU	PANGARIBUAN	4
103	SIEMPAT NEMPU HULU	TUALANG	4
104	SIEMPAT NEMPU HILIR	J A N J I	4
105	TIGA LINGGA	SUMBUL TENGAH	4
106	TIGA LINGGA	BERTUNGEN JULU	4
107	GUNUNG SITEMBER	BUKIT LAU KERSIK	4
108	GUNUNG SITEMBER	TUPAK RAJA	4
109	PEGAGAN HILIR	SIMANDUMA	4
110	PEGAGAN HILIR	BUKIT TINGGI	4
111	PEGAGAN HILIR	PERIK MBUE	4
112	TANAH PINEM	PAMAH	4
113	TANAH PINEM	TANAH PINEM	4
114	TANAH PINEM	PASIR MBELANG	4
115	SIDIKALANG	BINTANG MERSADA	5
116	BERAMPU	BANJAR TOBA	5
117	SITINJO	PANJI DABUTAR	5
118	PARBULUAN	LAE HOLE	5
119	PARBULUAN	B A N G U N	5
120	PARBULUAN	LAE HOLE II	5
121	SUMBUL	PEGAGAN JULU IV	5
122	SUMBUL	PEGAGAN JULU VIII	5
123	SILAHISABUNGAN	SILALAH I	5
124	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	SIRATAH	5
125	LAE PARIRA	SUMBUL	5
126	LAE PARIRA	BULU DURI	5
127	LAE PARIRA	LUMBAN SIHITE	5
128	LAE PARIRA	LUMBAN TORUAN	5
129	LAE PARIRA	KABAN JULU	5
130	SIEMPAT NEMPU	SIHORBO	5
131	SIEMPAT NEMPU	SOBAN	5
132	SIEMPAT NEMPU	ADIAN NANGKA	5
133	SIEMPAT NEMPU	GOMIT	5
134	SIEMPAT NEMPU	HUTA IMBARU	5
135	SIEMPAT NEMPU	ADIAN GUPA	5

136	SIEMPAT NEMPU HULU	KUTA TENGAH	5
137	SIEMPAT NEMPU HULU	BAKAL JULU	5
138	SIEMPAT NEMPU HULU	SIPOLTONG	5
139	TIGA LINGGA	PALDING	5
140	TIGA LINGGA	SUKANDEBI	5
141	TIGA LINGGA	LAU MOLGAP	5
142	TIGA LINGGA	LAU PAKPAK	5
143	TIGA LINGGA	LAU BAGOT	5
144	TIGA LINGGA	LAU SIREME	5
145	TIGA LINGGA	PALDING JAYA	5
146	PEGAGAN HILIR	TANJUNG SALUKSUK	5
147	TANAH PINEM	HARAPAN	5
148	SIDIKALANG	BATANG BERUH	6
149	SIDIKALANG	KALANG SIMBARA	6
150	SIDIKALANG	KALANG	6
151	SIDIKALANG	KOTA SIDIKALANG	6
152	SIDIKALANG	BELANG MALUM	6
153	SIDIKALANG	KUTA GAMBIR	6
154	SIDIKALANG	HUTA RAKJAT	6
155	BERAMPU	BERAMPU	6
156	SITINJO	SITINJO I	6
157	SUMBUL	PEGAGAN JULU I	6
158	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	BAKAL GAJAH	6
159	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	URUK BELIN	6
160	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	TUNGTUNG BATU	6
161	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	PARONGIL	6
162	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	POLLING ANAK-ANAK	6
163	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	PALIPI	6
164	SIEMPAT NEMPU	BUNTU RAJA	6
165	SIEMPAT NEMPU	SOSORLONTUNG	6
166	TIGA LINGGA	LAU MIL	6
167	TIGA LINGGA	TIGALINGGA	6
168	PEGAGAN HILIR	SIMARTUGAN	6
169	TANAH PINEM	KUTA BULUH	6



### 4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

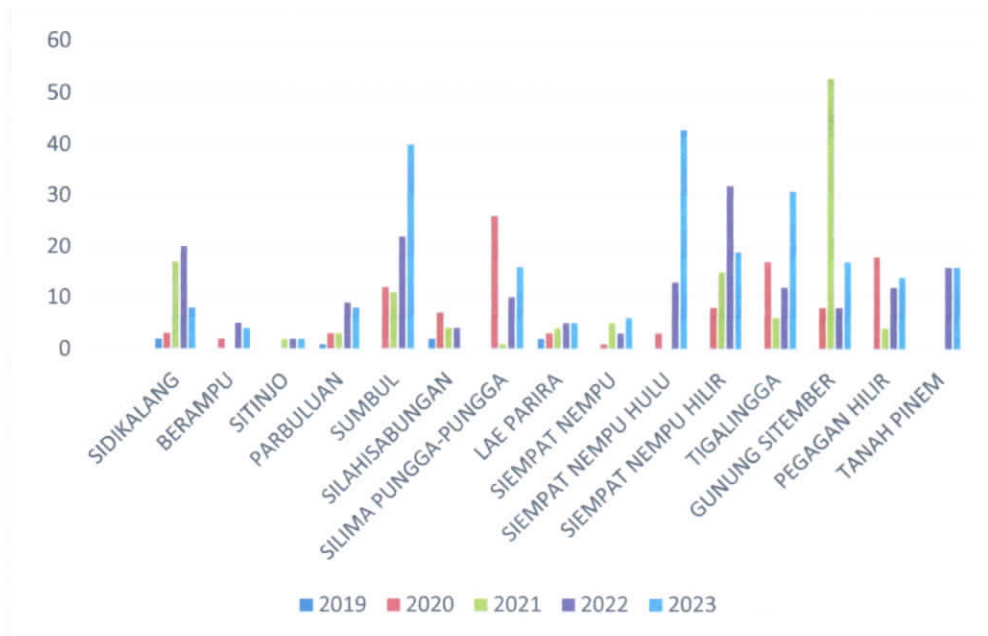
1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Dairi pada tahun 2023 sebanyak 229 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Pegagan Hilir (43 balita) dan Sumbul (40 balita), dan terendah ditemukan di Kecamatan Silahisabungan (0 balita).

**Tabel 4.3.1.** Penderita Gizi Buruk 2019-2023

NO	KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	SIDIKALANG	2	3	17	20	8
2	BERAMPU	0	2	0	5	4
3	SITINJO	0	0	2	2	2
4	PARBULUAN	1	3	3	9	8
5	SUMBUL	0	12	11	22	40
6	SILAHISABUNGAN	2	7	4	4	0
7	SILIMA PUNGA-PUNGA	0	26	1	10	16
8	LAE PARIRA	2	3	4	5	5
9	SIEMPAT NEMPU	0	1	5	3	6
10	SIEMPAT NEMPU HULU	0	3	0	13	43
11	SIEMPAT NEMPU HILIR	0	8	15	32	19
12	TIGALINGGA	0	17	6	12	31
13	GUNUNG SITEMBER	0	8	53	8	17
14	PEGAGAN HILIR	0	18	4	12	14
15	TANAH PINEM	0	0	0	16	16
	Total	7	111	125	173	229

**Gambar 4.3.1.** Grafik Penderita Gizi Buruk



Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Dairi adalah 3 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Dairi 1 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Sidikalang (2 jiwa) dan terendah terdapat di Kecamatan Berampu, Sitinjo, Parbuluan, Silahisabungan, Silima Pungga-Pungga, Lae Parira, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, dan Tigalingga (0 jiwa) sedangkan untuk kematian ibu saat melahirkan sebanyak 0 jiwa disemua Kecamatan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3.2.

**Tabel 4.3.2.** Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN BALITA	JUMLAH KEMATIAN IBU	TOTAL
1	SIDIKALANG	2	0	2
2	BERAMPU	0	0	0
3	SITINJO	0	0	0
4	PARBULUAN	0	0	0
5	SUMBUL	1	0	1
6	SILAHISABUNGAN	0	0	0
7	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	0	0	0
8	LAE PARIRA	0	0	0
9	SIEMPAT NEMPU	0	0	0
10	SIEMPAT NEMPU HULU	0	0	0
11	SIEMPAT NEMPU HILIR	0	0	0
12	TIGALINGGA	0	0	0
13	GUNUNG SITEMBER	0	0	0
14	PEGAGAN HILIR	0	1	1
15	TANAH PINEM	0	1	1

**Gambar 4.3.2.** Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

#### 4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Masalah gizi kronis (stunting) adalah hal yang penting diperhatikan, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak

dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
  - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
  - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
  - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
  - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua

kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.

2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):

- Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
- Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
- Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajanan yang tidak sehat.
- Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
- Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
- Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; panganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian zat besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.

- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)

3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

## BAB V

### KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

#### 5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 169 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Dairi maka didapatkan 0 desa (Prioritas 1), 9 desa (Prioritas 2), 28 desa (Prioritas 3), 67 desa (Prioritas 4), 47 desa (Prioritas 5) dan 18 desa (Prioritas 6).

**Tabel 5.1.** Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	0	0
2	9	5,32
3	28	16,56
4	67	39,64
5	47	27,81
6	18	10,65

125	LAE PARIRA	KABAN JULU	5
126	SIEMPAT NEMPU	SINAMPANG	5
127	SIEMPAT NEMPU	SOBAN	5
128	SIEMPAT NEMPU	SOSORLONTUNG	5
129	SIEMPAT NEMPU HULU	SILUMBOYAH	5
130	SIEMPAT NEMPU HULU	PANGARIBUAN	5
131	SIEMPAT NEMPU HULU	TUALANG	5
132	SIEMPAT NEMPU HULU	BAKAL JULU	5
133	SIEMPAT NEMPU HULU	SIPOLTONG	5
134	SIEMPAT NEMPU HILIR	SOPO BUTAR	5
135	TIGA LINGGA	SARINTONU	5
136	TIGA LINGGA	BERTUNGEN JULU	5
137	TIGA LINGGA	PALDING JAYA	5
138	GUNUNG SITEMBER	GUNUNG SITEMBER	5
139	GUNUNG SITEMBER	GUNDALING	5
140	GUNUNG SITEMBER	RANTE BESI	5
141	GUNUNG SITEMBER	KENDIT LIANG	5
142	GUNUNG SITEMBER	TUPAK RAJA	5
143	PEGAGAN HILIR	BANDAR HUTA USANG	5
144	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA	5
145	TANAH PINEM	PAMAH	5
146	TANAH PINEM	KUTA GAMBER	5
147	TANAH PINEM	LAU PERIMBON	5
148	TANAH PINEM	HARAPAN	5
149	TANAH PINEM	SUKA DAME	5
150	TANAH PINEM	PASIR MBELANG	5
151	TANAH PINEM	SINAR PAGI	5
152	SIDIKALANG	BATANG BERUH	6
153	SIDIKALANG	KOTA SIDIKALANG	6
154	SIDIKALANG	BELANG MALUM	6
155	BERAMPU	BERAMPU	6
156	SITINJO	SITINJO	6
157	SILIMA PUNGA-PUNGA	PARONGIL	6
158	SIEMPAT NEMPU	BUNTU RAJA	6
159	TIGA LINGGA	TIGALINGGA	6
160	GUNUNG SITEMBER	LAU LEBAH	6
161	PEGAGAN HILIR	BUKIT BARU	6
162	TANAH PINEM	RENUN	6
163	TANAH PINEM	PASIR TENGAH	6
164	TANAH PINEM	KUTA BULUH	6
165	TANAH PINEM	KEMPAWA	6
166	TANAH PINEM	GUNUNG TUA	6
167	TANAH PINEM	LAU TAWAR	6
168	TANAH PINEM	MANGAN MOLIH	6
169	TANAH PINEM	BALANDUA	6

**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
KABUPATEN DAIRI  
TAHUN 2024**



**Legenda**

KAB. DAIRI  
**Prioritas Komposit**  
 Prioritas 1  
 Prioritas 2  
 Prioritas 3  
 Prioritas 4  
 Prioritas 5  
 Prioritas 6

**Sumber Data**  
 1. BPS 2023  
 2. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2023  
 3. Dinas Kesehatan, 2023  
 4. Dinas PUTR, 2023  
 5. P3KE, Bappeda  
 6. Disdukcapil, 2023  
 7. Poddes Update Bpkp 2021



## **5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN**

Desa rentan terhadap kerawanan pangan secara umum disebabkan oleh :

1. Masih banyaknya penduduk yang mempunyai penghasilan rendah/kurang mampu sehingga susah untuk dapat mengakses pangan dengan baik.
2. Sarana prasarana penyedia pangan yang belum memadai dan terdistribusi kurang merata sehingga masyarakat membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi.
3. Masih banyak penduduk yang belum menggunakan fasilitas air bersih untuk keperluan rumah tangga.

## BAB VI REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- a. Desa-desas prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan Dairi
- b. Desa-desas yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- c. Desa-desas di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- d. Desa-desas pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

**Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan**



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan.

## PENUTUP

Pencapaian ketahanan pangan adalah harapan besar bagi masyarakat di Kabupaten Dairi. Namun demikian lingkup dan komponen permasalahan ketahanan pangan sangat luas dan kompleks, dan untuk mempercepat pencapaiannya memerlukan kerjasama semua pihak baik pemerintah secara kolektif lintas sektor maupun *stakeholder*. Pemangku kepentingan (*stake holders*) yang utama dari setiap komponen adalah masyarakat pelaku produksi, distribusi dan pengelola konsumsi. Oleh karena itu, masyarakatlah yang menjadi pemeran utama dalam pemantapan ketahanan pangan, sementara pemerintah melaksanakan peran fasilitasi dan pendukung yang bekerjasama dengan masyarakat dalam proses yang partisipatif. Hasil penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Dairi ini memiliki arti penting dalam proses kebijakan pangan di Kabupaten Dairi karena didalamnya disajikan dengan lengkap tentang kondisi pangan di semua desa/kelurahan yang ada di 15 Kecamatan di Kabupaten Dairi yang dapat dijadikan informasi yang cukup untuk mempercepat pencapaian ketahanan pangan di Kabupaten Dairi.

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

